

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG QATAR UNTUK MEMPERKUAT ALIANSI DENGAN IRAN PASCA KRISIS DIPLOMATIK QATAR TAHUN 2017

3.1 Analisis Neorealisme dalam Penguatan Aliansi Qatar-Iran

” Balancing is defined as allying with others against the prevailing threat, while states that have bandwagoned have aligned with the threat”

-Kenneth Neal Waltz, 1987

Pemaparan dari data-data krisis diplomatik Qatar serta gesekan konflik yang tengah terjadi di antara Qatar dan negara-negara kuartet anti Qatar telah memunculkan sebuah premis awal bahwa tekanan dan sanksi yang diberikan oleh kuartet anti Qatar pada akhirnya gagal membawa Qatar kembali ke dalam kontrol kuartet. Sebaliknya krisis diplomatik Qatar tersebut justru membawa hubungan Qatar dan Iran jauh lebih dekat. Sebuah kemungkinan terburuk yang tidak diinginkan oleh kuartet, utamanya Arab Saudi. Kemudian, hubungan Qatar-Iran tersebut diasumsikan oleh peneliti sebagai sebuah bentuk aliansi *bandwagoning*. Qatar memanfaatkan momentum tersebut guna menyeimbangkan kekuatan kuartet dan bertahan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang diberikan oleh kuartet. Dimana aliansi antara Qatar dan Iran tersebut pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi Qatar seperti meningkatkan kapabilitas domestiknya, mencapai keamanan dan bertahan dalam sistem internasional yang anarki.

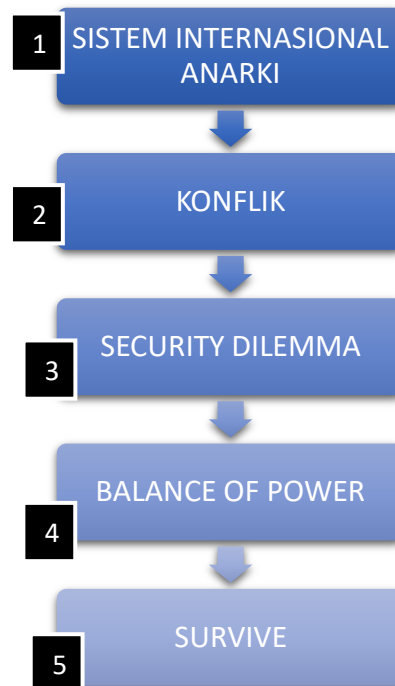
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Qatar mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan hubungan dan memperkuat aliansinya dengan Iran tidak hanya dapat dilihat dari satu aspek pendorong saja, misalnya aspek ekonomi, aspek keamanan, atau salah satu aspek lainnya saja. Menganalisis kepentingan dan kebijakan suatu negara berdasarkan aspek-aspek tertentu saja tentu akan membuat analisis dalam penelitian ini akan menjadi kurang dalam. Terlebih lagi dalam fenomena yang dibahas dalam penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa kebijakan yang diambil Qatar dalam menghadapi krisis diplomatiknya ini adalah

suatu bentuk bagi negaranya untuk *survive* atau bertahan dari ancaman-ancaman agregatnya. Menurut peneliti, langkah negara untuk *survive* dari suatu ancaman adalah tindakan konkret yang dihasilkan dari berbagai macam pertimbangan baik/buruk, untung/rugi, dan banyak latar belakang aspek yang dialokasikan menjadi suatu kebijakan atau langkah baru yang dapat membangkitkan negaranya.

Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh peneliti pada bab ini adalah menguji kebenaran dari premis tersebut. Setelah membahas mengenai penyebab dan dampak krisis diplomatik 2017 bagi Qatar maka analisis dalam bab ini dapat diperdalam. Menurut peneliti, dari penyebab dan dampak krisis yang telah dibahas di Bab II tersebut akan diperoleh informasi yang merujuk pada langkah-langkah Qatar untuk menentukan langkahnya menuju *survive*. Kemudian dalam bab ini akan dianalisis beberapa faktor yang melatarbelakangi penguatan aliansi Qatar dengan Iran. Mengingat krisis telah ditandai dengan tidak adanya dialog antar negara yang bersangkutan, gagalnya mediasi yang diprakarsai oleh Kuwait dimana menghasilkan 13 tuntutan kuartet anti Qatar juga telah terhenti. Kebencian dan sejarah-sejarah konfliktual yang terjadi antar pihak akhirnya menjadikan Dewan Keamanan Teluk atau GCC menjadi organisasi yang tidak berfungsi dengan baik. Keadaan-keadaan mendesak seperti itulah yang menyebabkan Qatar merubah beberapa kebijakan luar negerinya demi mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan negaranya, salah satunya adalah beraliansi dengan Iran.

Pertama-tama untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong mengapa Qatar melakukan manuver politik dari koalisi Teluk dan memperkuat aliansi dengan Iran daripada patuh kepada kuartet anti Qatar dalam kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017, dan untuk dapat melihat secara jernih terkait faktor pendorong penguatan aliansi Qatar-Iran tersebut, maka harus dilakukan penelitian secara jauh lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam usahanya untuk menganalisis permasalahan dalam subbab ini, peneliti akan mulai melakukan pembedahan alur berpikir yang telah disusun sebelumnya, tentu saja alur ini bersifat saling terhubung dan runtut untuk menganalisis faktor-faktor manuver Qatar dalam studi kasus penelitian ini :

Bagan 3. 1 Alur Bekerja Langkah Negara Menuju *Survive*



Sumber : Hasil Analisis Peneliti Diolah Berdasarkan *Theory of International Politics* (Waltz, 1979)

Untuk menganalisa studi kasus dalam penelitian ini lebih dalam lagi peneliti akan menggunakan teori neorealisme dan mengerucut pada konsep *bandwagoning* yang diturunkan dari neorealisme itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam konsep utama yang akan diterapkan peneliti untuk menganalisis studi kasus penelitian ini, akan ada beberapa alur pemikiran yang dibedah dalam analisis ini, tentu saja alur ini bersifat saling terhubung dan runtut. Menunjuk pada **bagan 3.1**, Alur pertama yang akan dibahas adalah anggapan Neorealis mengenai alur *survive* suatu negara dalam menghadapi ancaman. Kondisi dimana negara berusaha untuk *survive* menurut neorealisme dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya : 1) Sistem Internasional Anarki, 2) Konflik, 3) Security Dilemma, dan 4) Balance of Power.

3.1.1 Security Dilemma dalam Hubungan Qatar, Iran dan Kuartet anti Qatar

Tuntutan negara untuk dapat *survive* tersebut berkaitan dengan asumsi Waltz yang mengartikan keadaan tersebut disebabkan karena adanya sebuah sistem internasional anarki sebagai keadaan dimana tidak ada satupun otoritas yang berhak untuk mengikat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari negara itu sendiri. Oleh karenanya, ketidakhadiran sebuah otoritas yang berhak untuk mengatur anggota di dalam sistem, mendorong masing-masing negara untuk dapat menjamin keamanan negaranya sendiri. Keadaan tersebut kemudian menghasilkan fakta bahwa negara tidak pernah bisa yakin tentang niat negara lain, dan ketakutan tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Neorealis berpendapat bahwa sifat anarkis dari sistem internasional membuat negara mencapai dilema keamanan. Kondisi struktur internasional yang anarki yang sampai menghasilkan kondisi konfliktual terlihat pada peristiwa dimana Arab Saudi, pelopor blokade Qatar tahun 2017 memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Iran, negara yang menjadi salah satu alasan Qatar mendapatkan sanksi blokade oleh kuartet anti Qatar. Ketidakhadiran otoritas tertinggi dalam sistem internasional menyebabkan adanya persaingan kekuasaan regional bahkan internasional. Dalam kasus ini persaingan kekuasaan utamanya melibatkan anggota-anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan Iran. Arab Saudi dan Iran mulai menjadi rival dalam memperebutkan peran dominan di wilayah Teluk sejak terjadinya Revolusi Iran tahun 1979.

Dalam kondisi tersebut menurut Waltz, *security dilemma* merupakan hal yang wajar terjadi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh neorealis, Robert Jervis dalam bukunya "*cooperation under security dilemma*", *Security dilemma* mengacu pada situasi ketika tindakan yang diambil sebuah negara untuk meningkatkan keamanannya seperti memperkuat militer atau membuat aliansi sehingga dapat memaksa negara lain mengambil tindakan yang sama untuk tetap bertahan dalam sistem internasional yang anarki. Mearsheimer menambahkan dalam usahanya untuk mempertahankan kekuatan dan bertahan dalam persaingan,

negara dapat mengorbankan negara lain untuk setidaknya mereka tidak kehilangan kekuatan. Hal tersebut dapat terlihat dalam persaingan yang terjadi di dalam wilayah Teluk Persia. Arab Saudi telah lama menduduki peringkat sebagai negara terkuat di wilayah tersebut, namun harus merasa terusik dengan pertumbuhan pesat yang terjadi dalam salah satu negara koalisinya, Qatar, negara kecil namun sangat kaya di Teluk Persia. Kekuatan ekonomi Qatar merubah negara tersebut menjadi aktor yang banyak berperan dalam kasus regional. Persaingan kekuatan tidak hanya terjadi di antara negara yang berkoalisi, musuh regional juga berperan dalam persaingan ini. Satu negara yang dianggap menjadi ancaman kekuatan negara-negara Teluk Persia tersebut adalah Iran. Celakanya, Qatar memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Untuk menurunkan pengaruh dua negara tersebut di regional, Arab Saudi membentuk sebuah koalisi baru yaitu kuartet anti Qatar untuk mengisolasi Qatar dan menjauhkan pengaruh Iran di regional tersebut.

Security Dilemma memainkan perannya di dalam kebijakan Qatar yang baru setelah menerima isolasi dari aliansi baru yang dibentuk oleh Arab Saudi. Inti dari dilema itu adalah bahwa sebagian besar langkah yang diambil kekuatan besar untuk meningkatkan keamanannya sendiri secara otomatis akan mengurangi keamanan negara-negara lain. Sebagai contoh, setiap negara yang meningkatkan posisinya dalam keseimbangan kekuatan global melakukannya dengan mengorbankan negara-negara lain, sulit bagi negara untuk meningkatkan kesempatannya untuk bertahan hidup tanpa mengancam kelangsungan hidup negara lain. Tentu saja, negara-negara yang terancam kemudian melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, yang, pada gilirannya, mengancam negara-negara lain, yang semuanya mengarah pada persaingan keamanan yang berkelanjutan. (Mearsheimer, 2006)

Negara dituntut untuk berhadapan dengan langkah-langkah yang harus ia pilih untuk mengamankan dan menstabilkan negaranya dalam kondisi konfliktual sekalipun, kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam hal ini. Oleh karena itu negara akan cenderung berfikir strategis dalam mengambil langkah untuk menjaga keamanannya atau sekedar untuk mempertahankan kekuatannya. Kaum neoralis struktural seperti Waltz beranggapan bahwa kekuatan militer bukan satu-satunya

yang esensial. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum neoralis, kekuasaan merupakan akumulasi sumber-sumber militer dan kemampuan non militer yang dapat digunakan untuk memaksa dan mengontrol negara lain, tetapi merupakan kombinasi kapabilitas negara. (Steven L. Iamy, 2001)

Qatar memiliki posisi yang terhimpit diantara dua kekuatan besar bahkan dapat dikatakan paling dominan di wilayahnya, Teluk Persia yaitu Arab Saudi dan Iran. Baik secara geografis maupun secara politis Qatar harus berhadapan dengan kedua negara tersebut dalam kasus krisis diplomatiknya di tahun 2017 silam. Bahkan sebelum krisis diplomatik tersebut, Qatar telah menjadi bagian dari persaingan kekuatan Arab Saudi dan Iran. Sebagai negara yang berambisi untuk memiliki kebijakan yang mandiri atau independen, Qatar berusaha menyeimbangkan hubungan baik dengan keduanya. Dalam hal ini Qatar akhirnya ikut andil dalam persaingan kekuasaan di Teluk. Tak disangkal Qatar juga pasti akan memperjuangkan keamanan dan kekuatan negaranya untuk tetap bertahan dalam sistem internasional yang anarki. Qatar bukanlah negara yang memiliki kemampuan militer yang cukup kuat, Qatar menggunakan kemampuan ekonominya untuk membangkitkan kekuasaannya.

Kebangkitan Qatar akhirnya memberi jalan untuk Qatar dapat berpengaruh dalam segala bidang di Teluk Persia. Qatar memiliki hak nya sendiri untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan negara lain. Qatar memiliki andil untuk berperan sebagai aktor politik penting di Timur Tengah. Sayangnya, kebangkitan Qatar dipandang sebagai pesaing tambahan bagi kekuasaan di Teluk Persia. Ancaman ini bahkan datang dari negara-negara terdekat Qatar sendiri. Qatar kerap kali berusaha untuk keluar dari dominasi koalisi Arab Saudi yang mengekang kekuasaannya. Usaha Qatar untuk melampaui dominasi Arab Saudi dan negara besar lainnya menginisiasi koalisi Arab Saudi untuk mengisolasi Qatar dan menurunkan kapabilitas domestik Qatar. Menjadi pihak yang terancam, situasi dilemmatis kemudian dihadapi Qatar dan memaksa negaranya untuk berhadapan dengan langkah-langkah yang harus ia pilih untuk mengamankan dan menstabilkan negaranya dalam kondisi konfliktual sekalipun, kebijakan yang strategis sangat

penting untuk Qatar, sekalipun Qatar harus membentuk kebijakan yang mengarah ke persaingan lebih lanjut dan memberi ancaman kembali kepada pihak lawan.

Menelaah kembali persaingan yang terjadi di Teluk Persia yang sampai pada akhirnya membawa Qatar ke dalam situasi krisis diplomatik dan menghantarkannya mendekati dengan Iran. Sedikit melihat kembali kesejarahan masa lalu, revolusi Iran tahun 1979 secara dramatis mengubah sikap regional Teheran. Pemimpin revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini menyerukan penggulingan raja-raja pro-Amerika yang ada di Teluk. Invasi Irak ke Iran pada 1980 menarik Teluk Arab dan Amerika Serikat ke dalam konflik yang parah selama delapan tahun (Molavi, 2010). Revolusi Iran juga memecah ideologi Teluk menjadi dua blok, Iran memegang kekuatan ideologi Syi'ah dan Arab Saudi memegang kekuatan ideologi Sunni (Huwaidin, 2015). Revolusi Iran tersebut akhirnya membawa ancaman bagi Arab Saudi beserta aliansinya dan menganggap Iran muncul sebagai kekuatan revisionis yang harus dilawan. Tak lepas, Arab Saudi, Negara yang paling berpengaruh di GCC selalu khawatir akan menguatnya pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Semakin kuat Iran maka Arab Saudi akan semakin merasa terancam dan terus menaikkan tensi konfliknya dengan Iran . Bahkan baru-baru ini Arab Saudi dan UEA membawa Iran kedalam agenda GCC di PBB sebagai ancaman regional (Alkhereiji, 2018). Bahkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, menyampaikan pernyataan di PBB pada 28 September 2018, bahwa Iran telah terlibat dalam kegiatan teroris dan perilaku agresif dan bahwa Arab Saudi mendukung strategi Amerika Serikat untuk melawan Teheran, terutama menentang program rudal nuklir dan balistiknya. dan dugaan dukungan terornya,

“Saudi Arabia believes that in order to achieve peace and stability in the Middle East, what is necessary is to deter Iran and its subversive policies,”

“Iran has trained and armed terrorist militias, has provided them with ballistic missiles, conducting assassinations targeting diplomats, acts of aggression against diplomatic missions. This is sectarianism and interference in the internal affairs of the region,”

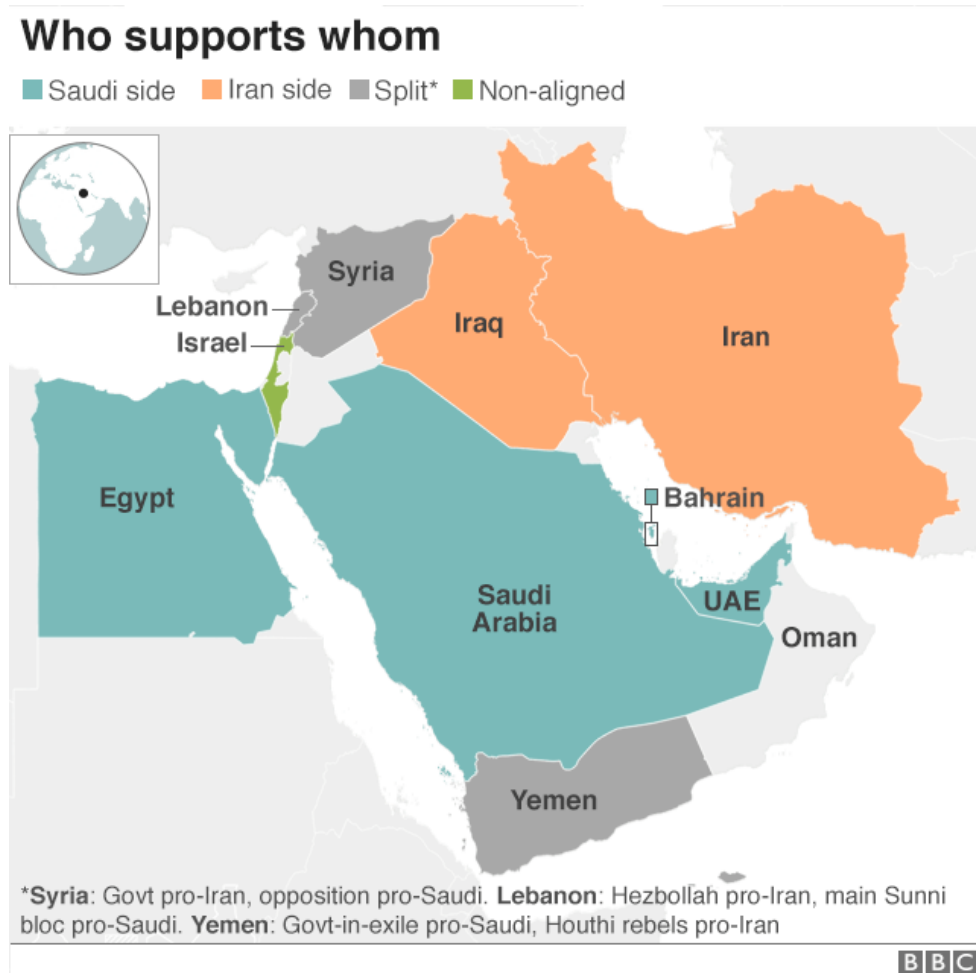
(Alkhereiji, 2018)

Perubahan sikap antara Arab Saudi dan Iran dipertegas oleh serangkaian peristiwa yang terjadi dalam waktu 15 tahun terakhir. Seperti peristiwa invasi Amerika Serikat di Irak tahun 2003, dimana Iran berhasil menggulingkan Saddam Hussein, seorang Arab Sunni yang telah lama menjadi musuh utama Iran (Marcus, 2017). Pada masa penggulingan, Iran banyak melakukan serangan terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya karena mendukung Saddam Hussein saat perang Iran-Irak tahun 1980-1988 (BBC, 2016). Hal tersebut menimbulkan peningkatan pengaruh Iran di Irak. Maju lebih cepat ke momentum *Arab Spring* tahun 2011 dimana terjadi ketidakstabilan politik di seluruh wilayah, Iran dan Arab Saudi mengeksploitasi pergolakan tersebut untuk memperluas pengaruhnya, terutama di Suriah, Bahrain dan Yaman (Marcus, 2017). Di Suriah, Iran adalah pendukung setia Bassar al- Assad sehingga Iran banyak memberikan dukungan militer kepada sekutu yang mendukung Assad seperti Hizbullah di Libanon (BBC, 2016). Sementara Arab Saudi beserta sekutunya mendukung kelompok-kelompok yang memberontak rezim Assad. Sementara di Yaman, Arab Saudi harus menghadapi kelompok pemberontak Houthi. Houthi merupakan kelompok minoritas Syi'ah yang cukup proaktif di Yaman. Hal tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi Arab Saudi karena semenjak Arab Saudi dan Yaman berbagi Semenanjung Arab, Houthi mulai menjadi kelompok yang memberontak pemerintah yang didukung Arab Saudi dan mengambil alih ibukota Sanaa. Dikarenakan Houthi adalah kelompok Syi'ah maka negara-negara Teluk beranggapan bahwa Iran merupakan dalang dan pendukung *rebels* tersebut. (BBC, 2016)

Di Bahrain, Iran masuk kedalam urusan dalam negeri Bahrain melalui dukungan terorisme, pelatihan teroris, penyelundupan senjata, menyebarkan hasutan sektarianisme dan mengeluarkan pernyataan untuk merusak keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas kawasan (Toumi, 2016). Iran juga pernah bersitegang dengan UEA mengenai klaim tiga pulau yang ada di UEA. UEA bersama Dewan Keamanan Teluk pernah mengecam Iran dan mengambil sikap tegas atas pendudukan Iran di tiga pulau UEA dengan mengambil hak atas pulau-pulau tersebut bersama dengan hak atas perairan regional, wilayah udara, landas kontinen, dan ZEE ketiga pulau tersebut (Toumi, 2016). Dewan Tertinggi GCC

menegaskan bahwa Iran tidak berhak mengambil alih atau menduduki tiga pulau tersebut dan menyatakan bahwa setiap keputusan atau kegiatan yang dilakukan oleh Iran di tiga pulau UEA adalah tidak sah, dibatalkan, dan tidak mengubah fakta sejarah atau hukum bahwa hak ketiga pulau tersebut adalah milik UEA (Toumi, 2016), sehingga Iran sempat dipanggil untuk datang ke Mahkamah Internasional guna menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi langsung. (Toumi, 2016)

Gambar 3. 1 Koalisi Regional di Teluk Arab

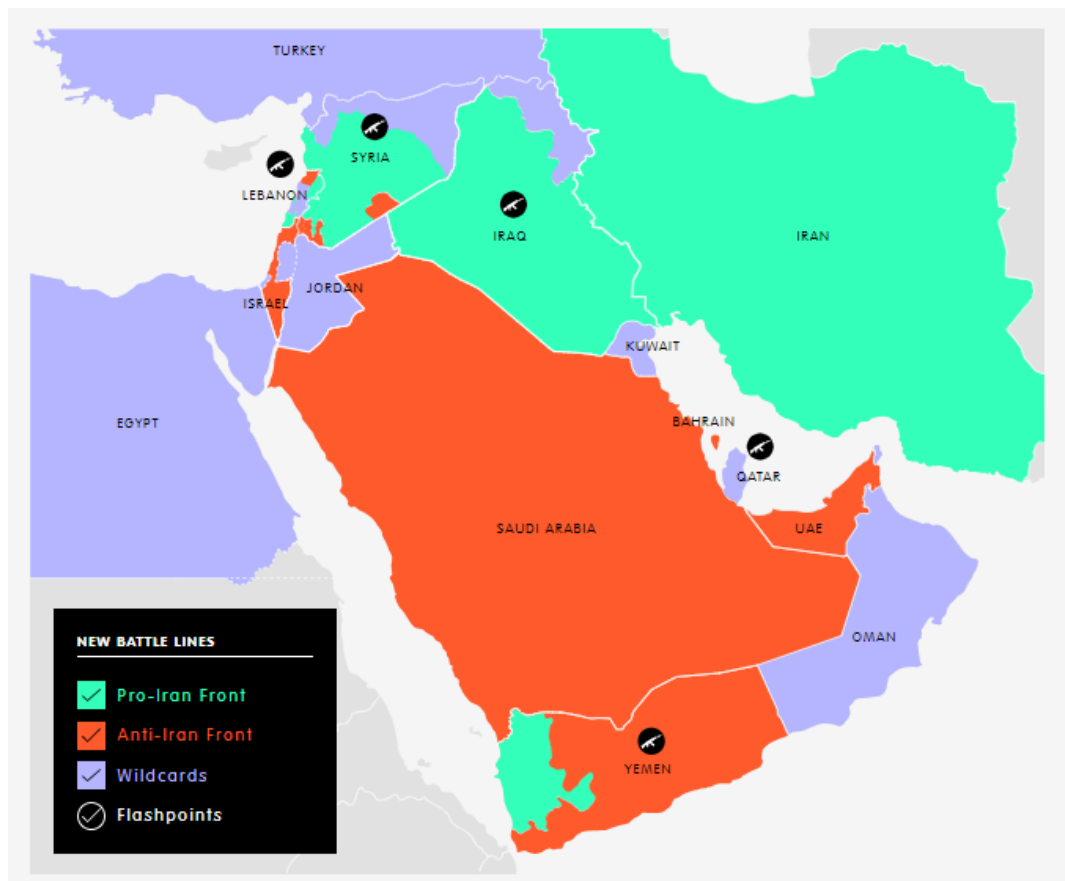


Sumber : www.bbc.com

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, munculah pergeseran regional yaitu tentang siapa melawan siapa. Terdapat dua kubu yang terbentuk, di kubu pro-Saudi terdapat aktor-aktor Sunni utama lainnya di Teluk yaitu UEA, Kuwait dan Bahrain, serta Mesir dan Yordania (Marcus, 2017). Sedangkan di kubu Iran terdapat pemerintah Suriah, yaitu rezim Assad yang sangat didukung oleh Iran, kemudian terdapat

kelompok-kelompok milisi Syiah pro-Iran, termasuk Hizbullah yang bermarkas di Lebanon, yang memainkan peran penting dalam memerangi kelompok-kelompok pemberontak Sunni (Marcus, 2017). Pemerintah Irak yang didominasi Syiah juga merupakan sekutu dekat Iran, meskipun secara paradoksal ia juga mempertahankan hubungan dekat dengan Amerika Serikat untuk membantu dalam perjuangan melawan Negara Islam (Marcus, 2017).

Gambar 3. 2 Garis Pertempuran di Timur Tengah



Sumber : www.ecfr.eu

Dua koalisi yang saling bertentangan di Timur Tengah tersebut mendefinisikan persaingan yang mengancam dan berpotensi dapat menghancurkan wilayah tersebut. Seiring meningkatnya persaingan untuk menjadi aktor dominan di wilayah tersebut akhirnya menarik lebih banyak kepentingan negara lain untuk ikut masuk. Konfrontasi antara kubu Iran, dan kubu pro Arab Saudi yang didukung oleh kekuatan Barat saat ini berpusat di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel

sehingga negara-negara tersebut sekarang menjadi garis pertempuran utama di kawasan Timur Tengah (European Council on Foreign Relations, n.d.). Seperti yang terlihat di **gambar 3.2** peta garis pertempuran di atas.

Lalu bagaimana dengan Qatar? Dalam kasus krisis Qatar, kondisi tersebut sangat berpengaruh untuk Qatar. Mengingat salah satu penyebab Qatar mendapatkan sanksi blokade adalah hubungannya dengan Iran ketika Qatar masih menjadi bagian dari anggota Dewan Teluk atau GCC yang didominasi oleh kekuatan Arab Saudi. Tidak seperti anggota GCC yang lain, Qatar memiliki dua sudut pandang kebijakan untuk mempertahankan hubungan dengan kedua belah pihak. Seperti pisau bermata dua, Qatar dapat memperoleh perlindungan diplomatik dengan bergabung ke dalam GCC serta mengadopsi segala kebijakan GCC dengan tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Iran. Meskipun Qatar harus beberapa kali mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan GCC untuk menentang kepentingan Iran dan membuat Teheran tidak senang, tetapi Qatar dapat beberapa kali menangani hal tersebut. Jika dilihat sekilas pandang, sikap Qatar ini seolah mencerminkan bahwa Qatar memiliki kebijakan luar negeri yang tidak konsisten. Dengan kebijakan dua mata pisau yang diadopsi Qatar, yakni dalam memelihara hubungan antar negaranya dengan negara-negara Teluk bersamaan dengan hubungannya dengan Iran, akhirnya menghasilkan sudut pandang yang tidak terfokus pada satu pihak saja. Kebijakan luar negeri Doha yang independen menimbulkan kejengkelan dari Kuartet anti Qatar, terutama Arab Saudi dan UEA. Karena akibat kebijakannya yang independen tersebut Qatar sering melakukan tindakan-tindakan manuver politik, yang kerap kali melanggar konsekuensi yang ia miliki sebagai negara Teluk Persia.

Di satu sisi, Qatar pernah ikut serta ke dalam KTT GCC Ke-37 di Bahrain mengenai penolakan Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atas intervensi Iran di regional mereka. KTT yang diadakan oleh pemimpin-pemimpin Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tersebut menekankan bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk memerangi ideologi ekstremis yang memberi ruang bagi tumbuhnya terorisme dan mengubah citra Islam. Mereka juga menyerukan komunike tentang Iran untuk sepenuhnya mematuhi prinsip-

prinsip bertetangga yang baik, untuk menghormati kedaulatan negara lain, bukan untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain dan untuk menahan diri dari menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan. Dalam KTT GCC Ke-37 di Bahrain yang dipimpin oleh Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahamd Al-Jaber Al-Sabah, mengatakan : (Toumi, 2016)

“The GCC Supreme Council has called on Iran to immediately cease such practices that represent a violation of the sovereignty and independence of the GCC countries and to commit to the principles of good neighbourliness and to international laws, covenants and norms in order to preserve the security and stability of the region,”

Artinya, segala pihak yang terlibat dalam KTT tersebut sependapat bahwa Iran adalah pihak yang mengganggu stabilitas keamanan blok regional mereka, dan sepakat bahwa Iran adalah negara yang aktif mendukung aksi-aksi terorisme. Oleh karena itu, Dewan Tertinggi dalam KTT menekankan bahwa Iran harus mengubah kebijakannya yang kerap dikaitkan dengan menyembunyikan kelompok-kelompok teroris termasuk militan Hizbullah, mendukung perkembangan milisi wilayah, dan menghasut dengan paham sektarian. Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahamd Al-Jaber Al-Sabah, yang juga ketua sesi dalam KTT ke-37 GCC tersebut mengatakan bahwa resolusi KTT GCC ke-37, yang diadakan di Manama, akan membantu untuk mengkonsolidasikan aksi bersama di blok regional mereka dalam mewujudkan harapan rakyat akan keamanan dan stabilitas lebih lanjut (Saudi Press Agency, 2016).

Dalam KTT tersebut setidaknya terlihat bahwa Iran bukanlah negara yang dianggap bersahabat bagi anggota-anggota Teluk. Berikut adalah keterlibatan Iran dengan beberapa negara-negara GCC yang dalam Krisis Qatar menjadi Quartet anti Qatar yang menciptakan tensi buruk antar mereka. Dalam KTT tersebut disampaikan bahwa Dewan Tertinggi GCC mengutuk upaya Iran untuk mempolitisasi haji dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Arab Saudi. KTT tersebut juga mengutuk campur tangan Iran dalam urusan internal negara-negara Teluk. Pertemuan negara-negara Teluk tersebut juga mengecam senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh Iran. KTT menekankan bahwa negara berhak menggunakan energi nuklir dengan catatan penggunaannya secara damai dan tidak menimbulkan ancaman keamanan

bagi negara manapun. Sebagai anggota Dewan Keamanan Teluk atau GCC, Qatar juga mematuhi isi-isi ketentuan dalam piagam GCC tahun 1981 dimana menentukan komitmen negara-negara dalam piagam tersebut untuk menyatukan pandang dan adopsi kebijakan dalam negaranya dengan kepentingan regional yang sama.

Di sisi lain, Qatar tidak bersikap sama seperti negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) lainnya, terutama seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Doha memandang upaya Teheran yang dianggap untuk menghasut perselisihan sektarian di wilayah Teluk Persia bukan sebagai ancaman yang serius (European Council on Foreign Relations, n.d.). Ia juga memandang hubungannya dengan Iran sebagai hal yang penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanannya (European Council on Foreign Relations, n.d.). Sebagai contoh loyalitasnya terhadap Iran, Qatar pernah menahan diri untuk tidak langsung mengkritik campur tangan Iran dalam pemberontakan Syiah di Bahrain pada tahun 2011 (Fulton, 2010). Bahkan Qatar sempat mengadakan beberapa pertemuan tingkat tinggi dengan para pejabat Iran untuk membahas perjanjian keamanan dan ekonomi selama periode di mana pemberontakan tersebut terjadi (Fulton, 2010). Sementara GCC melontarkan kritik terhadap campur tangan Iran di Bahrain kala itu. Walaupun begitu, Qatar melakukan hubungan dengan Teheran dengan cara yang diperhitungkan dan hati-hati, agar tidak terlalu mengganggu negara GCC lainnya.

Menelusik kembali anomali-anomali dari kebijakan yang pernah dikeluarkan Qatar yang berakibat pada meningkatnya intensitas konflik negaranya dengan Kuartet. Namun kali ini, anomali-anomali yang ditonjolkan adalah manuver Qatar dari Kuartet yang berhubungan erat dengan kedekatan Qatar-Iran. Manuver politik Qatar kali ini adalah ketika Qatar menunjukkan sikap yang berbeda untuk Iran. Hubungan Qatar-Iran mulai dipandang buruk oleh Kuartet anti Qatar dan mulai memuncak ketika momentum *Arab Spring*. Momentum *Arab Spring* tersebut memicu persaingan-persaingan regional di antara kekuatan monarki Sunni, Iran, dan kelompok-kelompok Islamis. *Arab Spring* telah menempatkan kepemimpinan dan orientasi sejumlah negara di kawasan tersebut siap untuk diperebutkan. Dalam

beberapa kasus, salah satunya konflik Suriah, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Iran adalah negara yang dapat memperoleh manfaat utama apabila Assad memenangkan rezim di Suriah. Alih-alih mengkonsolidasikan upaya bersama negara-negara Teluk yang menentang Assad dan ISIS, Qatar malah menciptakan persaingan dengan Arab Saudi, kekuatan dominan di Regional mereka. Persaingan antara Arab Saudi dan Qatar mendorong mereka untuk mendukung kelompok yang berbeda, alhasil mereka menciptakan banyak *chaos* di Suriah.

Manuver-manuver kecil Qatar dari negara-negara tetangganya sendiri sudah sering terlihat di masa lalu, misalnya, di daerah sekitar Damaskus, Riyadh menyalurkan uang dan senjata ke Jaysh al-Islam sementara Qatar mendukung saingannya Faylaq al-Rahman. Upaya tersebut kemudian diketahui bertujuan untuk melayani kepentingan rezim Assad yang didukung Iran (Gordon, et al., 2017). Dalam kasus-kasus lain, dimana terdapat pengaruh Iran walaupun minim, persaingan antara Doha dan Riyadh menghasilkan ketidakstabilan dan kekerasan yang lebih besar. Misalnya, di Mesir, Saudi mendukung pendirian militer-politik tradisional sementara Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dan organ politiknya, bahkan Qatar memberikan bantuan dana sebesar delapan miliar dolar untuk mendukung pemerintah yang dipimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir (Cunningham, 2014). Contoh manuver Qatar lainnya adalah di Libya, Arab Saudi dan UEA mendukung para pemimpin militer sekuler seperti Jenderal Khalifa Hiftar, sementara Qatar mendukung kelompok-kelompok Islam yang berbasis di Mistrata, sehingga memicu perang sipil Libya dan menciptakan peluang bagi pertumbuhan Negara Islam di Libya. (Gordon, et al., 2017)

Qatar dan Iran tampak mempertahankan hubungan diplomatik mereka yang cukup kuat. Hal tersebut tentu terlihat sulit untuk sebuah negara bekerjasama dengan dua belah pihak yang saling bertentangan atau bersitegang di wilayahnya. Walaupun dalam hal ini niat Qatar adalah menjadi negara yang netral dan mau berhubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Iran namun pada akhirnya akan mendapat pandangan buruk dari kuartet anti Qatar. Sikap-sikap Qatar tersebut ditambah dengan penyebab-penyebab krisis Qatar seperti

pelanggarannya terhadap perjanjian Riyadh tahun 2013-2014; atas tuduhan untuk Qatar mengenai dukungannya terhadap Hamas kelompok Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat, Israel, Mesir, UEA, Arab Saudi, dan Kanada; keterlibatan Qatar dalam dukungan Ikhwanul Muslimin di Mesir; atas hubungan dekat Qatar dengan Iran dan tuduhan bagi Qatar karena mendukung organisasi-organisasi terorisme yang berkaitan dengan Iran seperti Al-Qaeda yang berafiliasi di Syria sebagai al-Nusa Front; untuk tuduhan atas dukungan Qatar untuk organisasi terorisme ISIL; dan untuk dukungan Qatar atas kegiatan-kegiatan terorisme lainnya. Atas hal tersebut, Qatar harus menerima konsekuensi di tanggal 5 Juni 2017, untuk pemutusan hubungan diplomatik dari kuartet anti Qatar dan untuk sanksi blokade yang di sematkan. Qatar juga harus menghadapi 13 tuntutan yang diajukan oleh kuartet sebagai jalan damai. Salah satunya yang paling mencolok untuk analisis studi kasus ini adalah Qatar harus memutuskan hubungan diplomatiknya secara keseluruhan dengan Iran.

Koalisi baru yang dibentuk Arab Saudi sebagai kuartet anti Qatar telah melukai keamanan dan menciptakan *security dilemma* bagi Qatar. Hal tersebut memaksa Qatar untuk menghadapi dua pilihan kebijakan, yaitu kembali kedalam kontrol Saudi atau menciptakan kebijakan independen dan bebas untuk beraliansi dengan Iran. Secara geografis maupun geopolitik terletak antara Arab Saudi dan Iran, Qatar dikepung oleh kedua kekuatan regional Teluk Persia. Oleh sebab itu Qatar mengembangkan kebijakan luar negeri dan pertahanannya sendiri dengan mempertahankan kerja sama yang erat dengan negara-negara Teluk melalui GCC, pada saat yang sama Qatar juga merasa perlu untuk tetap berdialog dengan Iran. Namun hal ini telah dianggap oleh Arab Saudi sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara-negara GCC, juga sebagai ancaman. Untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang bermusuhan, negara-negara kecil, termasuk Qatar, biasanya mengadopsi strategi yang berbeda dari negara-negara dengan kekuatan lebih besar. Strategi-strategi tersebut mencakup, secara terpisah atau bersamaan; mengandalkan organisasi internasional, lindung nilai, dan aliansi. Masing-masing strategi datang dengan pro dan kontra, tetapi yang lebih penting adalah bahwa strategi-strategi tersebut biasanya bekerja dengan baik sampai negara kecil dapat menghadapi tindakan agresi yang melebihi kemampuan pertahanannya.

Bagan 3. 2 Perkembangan Alur Bekerja Langkah Qatar Menuju Survive



Sumber : Diolah Berdasarkan Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan **Bagan 3.2**, peneliti menemukan hasil analisis bahwa ketika negara masuk ke dalam situasi *security dilemma*, maka negara tersebut akan dihadapkan kepada beberapa pilihan langkah atau kebijakan atau sikap yang nantinya akan mempengaruhi keselamatan negara itu sendiri dari ancaman atau konflik yang tengah dihadapi. Begitu juga dengan Qatar, Sheikh Tamim dihadapkan pada pilihan apakah negaranya harus memenuhi semua tuntutan kuartet anti Qatar dan kembali berdamai, atau beraliansi dengan Iran dan menjalani hubungan yang diasingkan oleh banyak pihak. Qatar hanya diberi waktu 10 hari untuk memenuhi tuntutan kuartet anti Qatar tersebut. Pada masa-masa terberatnya tersebut Qatar banyak mendapat tekanan dan kecaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam krisis diplomatik Qatar.

Sebagai jawaban atas *security dilemma* nya, tepat pada 23 Agustus 2017 melalui website resmi Kementerian Luar Negerinya (www.mofa.gov.qa), Qatar memberitakan bahwa negaranya akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemberitaan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa Qatar akan memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Iran di segala bidang.

الدوحة – المكتب الإعلامي - 23 أغسطس"

أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية.
وعبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات."

"Doha / Information Office / August 23

The State of Qatar announced today that its ambassador to Tehran will return to exercise its diplomatic duties.

The State of Qatar expressed its aspiration to strengthen bilateral relations with the Islamic Republic of Iran in all fields. "

Sheikh Tamim memberi keputusan untuk mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Iran di segala bidang walaupun negaranya tengah mendapat hujan tuduhan dari Kuartet anti Qatar mengenai dukungan Qatar terhadap organisasi-organisasi teroris di Iran. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis tanggal 23 Agustus 2017 tersebut, secara gamblang Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan duta besarnya akan kembali ke Teheran untuk melanjutkan tugas diplomatiknya dan menyatakan minatnya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Iran. Dengan hal tersebut Qatar secara tidak langsung telah mangkir dari 13 syarat atau tuntutan yang diajukan oleh Kuartet anti Qatar untuk mencabut blokade 5 Juni 2017 terhadap Qatar di semua bidang , termasuk didalamnya Qatar menolak tuntutan kuartet anti Qatar untuk memutuskan hubungan diplomatik secara keseluruhan dengan Iran. Qatar sejauh ini menolak untuk mematuhi persyaratan apa pun dari kuartet anti Qatar, dan pengumuman tersebut dapat memperdalam keretakan antar mereka. (Ohikere, 2017)

Alhasil, persekongkolan geopolitik tersebut telah menempatkan negara Teluk Persia yang kecil namun sangat kaya itu melawan tetangganya dan mengguncang bagian Timur Tengah yang sebelumnya tenang. Setelah Kementerian Luar Negeri

Qatar mengumumkan bahwa mereka mengirim duta besarnya kembali ke Teheran setelah absen 20 bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 ketika terjadi serangan terhadap dua fasilitas diplomatik Saudi di Iran. Keputusan Qatar tersebut memang akan semakin memperparah hubungannya dengan negara Teluk, Qatar tetap memutuskan untuk berhubungan baik dengan Iran (Walsh, 2017). Krisis Diplomatik Juni 2017 di Qatar ini juga memberi peluang bagi Iran untuk mendorong ganjalan antara anggota GCC. Dalam krisis diplomatik Qatar tersebut Teheran mendukung Doha untuk menghadapi perselisihan dengan negara-negara tetangganya tersebut.

Gambar 3. 3 Presiden Rouhani melakukan panggilan telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan menyatakan kesediaan Iran untuk memperkuat hubungan kedua negara



Sumber : www.president.ir

Satu minggu setelah Sheikh Tamim mengumumkan niatnya untuk mempererat hubungan bilateral Qatar dengan Iran, Dr Hassan Rouhani, presiden Iran melakukan panggilan telepon kepada Emir Qatar yang menyatakan kesiapan Iran untuk mempererat hubungan dengan Qatar sebagai negara sahabat dan saudaranya, dengan mengatakan bahwa apa yang diterima Qatar dalam kekacauan kawasan tersebut tidak adil bagi Qatar (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2017) :

”The Islamic Republic of Iran believes that what is being imposed on Qatar is unjust and it leads to more tension among countries of the region.”

Dalam percakapan melalui telepon tersebut, Rouhani juga berkata bahwa Iran akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemerintah Qatar dan bersedia untuk berkontribusi pada stabilitas regional, Dr Rouhani menambahkan, Iran dan Qatar perlu mengadakan pertemuan untuk membahas masalah regional yang tengah dihadapi Qatar dan membahas agenda-agenda penguatan basis kerjasama serta kolaborasi antar negara demi mencapai kepentingan bersama (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2017).

Dalam panggilan telepon yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2017 tersebut, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga mengucapkan kesediannya untuk mengembangkan hubungan diplomatik mereka selama hubungan tersebut memberi manfaat bagi kedua belah pihak (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2017) :

“Qatar is willing to deepen and cement relations with the Islamic Republic of Iran in all fields and this development in relations is beneficial to both nations and the region”.

Sheikh Tamim juga menyampaikan rasa terimakasihnya dan juga menghargai kebijakan Iran dalam mendukung Qatar selama menghadapi sanksi tidak adil yang dijatuhkan pada negara itu (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2017),

“The people and government of Qatar are grateful to Iran for opening its borders to Qatar and will not forget it”.

“The outlook of Tehran-Doha cooperation and relations in all political, economic and cultural fields is very bright and promising and Qatar is ready to take advantage of this historical opportunity to deepen ties with Iran in all fields of mutual interest”.

Melihat sikap dan kebijakan yang diambil oleh Qatar sesuai dengan konsep Waltz, dimana Negara yang masuk ke dalam sistem internasional anarki dan tengah terjebak ke dalam situasi konfliktual secara otomatis akan dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan untuk mencapai *survive*, atau dapat dikatakan bahwa

negara harus berdiri di atas kaki sendiri dan bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri (Waltz, 1979). Salah satu cara yang dapat dilakukan negara untuk tetap bisa bertahan dalam sistem tersebut menurut Waltz adalah melalui kerjasama. Di balik kerjasama tersebut pasti ada kepentingan nasional yang dijunjung tinggi oleh negara. Untuk itu, negara sebagai aktor rasional pasti akan memikirkan untung rugi. Kerjasama yang menguntungkan akan ia ambil dan sebaliknya, jika merugikan negara akan cenderung tidak mau bekerjasama (Donnelly, 2000). Aspek-aspek tersebutlah yang pada akhirnya akan membawa negara harus *survive* atau bertahan dalam tatanan internasional dewasa ini.

Walaupun begitu, peneliti percaya disetiap pilihan pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Keputusan Qatar untuk kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Iran pada realitanya membawa beberapa dampak yang tidak menyenangkan untuk Qatar. Keputusan Qatar untuk menolak menuruti persyaratan apapun dari kuartet anti Qatar untuk memulihkan hubungan diplomatik diantara mereka, membawa beberapa kecaman dan kemarahan dari kuartet anti Qatar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menjalin hubungan dengan Iran pada kenyataannya akan membawa Qatar ke tuduhan-tuduhan negatif lainnya yang lebih dalam. Utamanya tuduhan yang berkaitan dengan dukungan terorisme. Walaupun begitu, setidaknya Qatar telah meyakini bahwa dalam situasi krisis tersebut Iran jauh lebih bisa mengamankan negaranya dibandingkan tetap bersama dengan kuartet anti Qatar.

Ketertarikan peneliti dalam menganalisis hubungan Qatar dan Iran dalam studi kasus krisis diplomatik Qatar ini, mendorong peneliti menggunakan sudut pandang strategi aliansi *bandwagoning*. Salah satu bentuk *Balance of Power* milik neorealis, Stephen Walt sebagai strategi yang digunakan Qatar untuk menambah *power* dalam menghadapi tekanan kuartet anti Qatar dalam krisis diplomatik 2017.

3.1.2 Implementasi *Balance of Power* dalam Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017

Dalam Neorealisme *Balance of Power* pada intinya adalah suatu konsep untuk menjelaskan perilaku negara yang akan terus mengusahakan kekuatannya untuk tetap bertahan dalam struktur internasional. Dalam *Balance of Power* negara-negara akan menghindari dominasi dari satu negara besar saja, negara akan selalu intens mempelajari perkembangan kekuatan dari negara lain sehingga muncul ketakutan dan *security dilemma* bagi negara dalam struktur tersebut untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas negaranya dalam mencapai keseimbangan atau equilibrium. Terlepas dari keanggotaannya di Dewan Kerjasama Teluk (GCC), setelah menerima berbagai macam tuduhan yang tidak masuk akal dari Kuartet anti Qatar, setelah kuartet anti Qatar memberikan sanksi blokade yang tidak adil, Qatar telah melihat bahwa hubungannya dengan negara-negara tetangga Teluk memburuk secara signifikan. Krisis diplomatik tahun 2017 membawa Qatar ke dalam kondisi terlemah.

Selain itu, krisis Qatar telah mempengaruhi peningkatan konflik sektarian di Timur Tengah. Krisis Qatar juga telah mendorong kawasan tersebut ke dalam kekacauan dan ketidakpastian baru. Setelah lama melihat persaingannya dengan Iran sebagai konflik sektarian, Arab Saudi telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan posisinya yang lebih unggul di Teluk Persia dibanding Iran, salah satunya dengan memprakarsai gerakan mengisolasi Qatar untuk semakin menjauhkan peran Iran di kawasan. Justru upaya tersebut gagal dan menyebabkan peran Iran di kawasan semakin menonjol. Terlebih, Dewan Kerjasama Teluk (GCC) juga harus menghadapi krisis eksistensial. Esensi organisasi ini dibentuk pada tahun 1981 sebagai kerangka kerja keamanan di mana para anggotanya dapat menyeimbangkan kekuatan Iran, justru saat ini GCC terbagi menjadi dua blok. Satu terdiri dari Arab Saudi, UEA, dan Bahrain; yang lain, negara-negara yang menolak menerima embargo sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan intra-GCC, yaitu Kuwait, Oman, dan Qatar. Meski begitu, Kuwait memilih menjadi penengah dan Oman menjadi pihak yang cenderung netral. Sehingga dalam koalisi ini Qatar sempat merasakan isolasi yang cukup mengganggu stabilitas dan keamanan negaranya hampir di segala bidang.

Pada awal krisis diplomatik Qatar, keseimbangan kekuasaan sangat membebani Qatar. Tak dipungkiri, jika bertahan seorang diri, Doha memiliki posisi yang rentan dalam semua hal. Negara kecil ini memang sangat kaya dan paling maju di bidang ekonomi, tetapi untuk pertahanan militernya, bukan rahasia umum lagi bahwa Doha lemah dibidang tersebut. Seandainya kuartet anti Qatar seketika mengambil tindakan militer terhadap Doha, Qatar tidak akan mampu mempertahankan negara mereka seorang diri. Hal tersebut memaksa Qatar untuk melakukan penyeimbangan kekuasaan untuk menghadapi ancaman kuartet yang bida muncul kapan saja. Konsep *balance of power* milik Waltz juga dapat menimbulkan *arm race*. Walaupun belum ada tanda-tanda serangan atau tindakan militer dari kuartet anti Qatar, Doha telah mempersiapkan pengembangan kemampuan militernya, bahkan beberapa tahun sebelum krisis diplomatik 2017 terjadi. Ketidakstabilan politik di Teluk Persia dapat menjadi pertimbangan Doha untuk mengembangkan pertahanan militernya yang mandiri. Dari sejarahnya, Qatar memang rentan terlibat konflik dengan negara-negara besar di teluk Persia tersebut. Tidak dipungkiri bahwa Qatar harus meningkatkan kapabilitas militernya untuk berhadapan dengan kapabilitas militer yang dimiliki negara-negara kuartet yang notabenenya sangat kuat dan telah maju sejak lama.

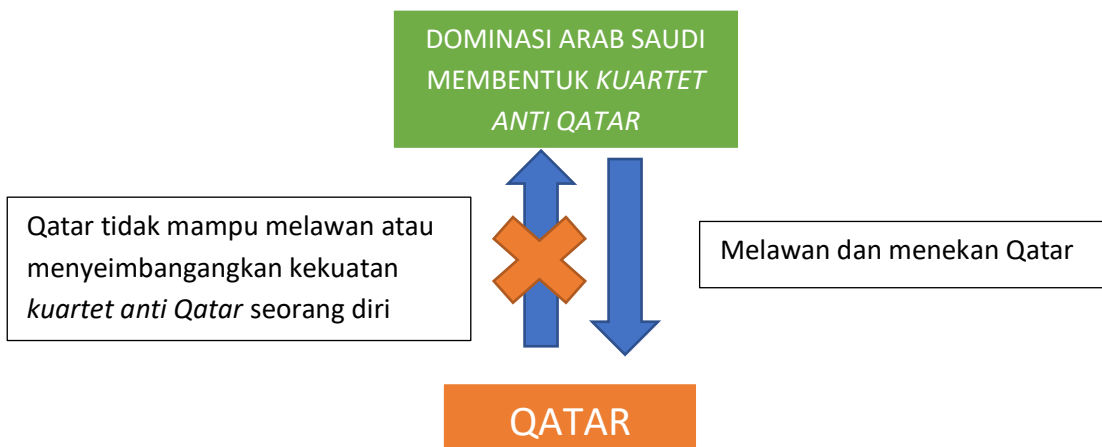
Seperti tetangganya yang lebih besar, dengan kekayaannya yang sangat besar, negara kecil ini telah berinventasi untuk modernisasi militernya. Qatar telah menyalurkan puluhan miliar dolar ke beberapa pengembang sistem senjata paling canggih di dunia. Menteri Pertahanan Negara Qatar, Khalid al-Attiyah mengatakan pengembangan militer Qatar tersebut telah direncanakan selama beberapa tahun, bahkan sebelum boikot politik dan ekonomi yang dipimpin Arab Saudi sejak Juni 2017 terjadi (Reuters, 2018). Sejak Attiyah ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Negara Qatar tahun 2016 oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim, beliau mencetuskan rencana untuk mengembangkan tentara modern yang profesional serta industri pertahanan yang kuat bagi Qatar, terutama di bidang pertahanan berbasis darat (Bakeer, 2018). Ambisi tersebut pertama diwujudkan melalui pembukaan fasilitas militer baru, kemudian melakukan negosiasi-negosiasi kontrak pertahanan, dan meningkatkan ruang lingkup kerjasama Qatar dengan negara lain. Peningkatan kapabilitas militer Qatar ini menggambarkan ketakutan Doha akan invasi yang

dapat tiba-tiba dilakukan oleh koalisi atau blok yang dipimpin Arab Saudi. Sejak krisis diplomatik terjadi, Qatar telah mengumumkan pembelian tiga sistem jet tempur yang berbeda, termasuk 36 F-15 dari Amerika, 12 Rafale Fighter Prancis, dan 24 pesawat Topan Eurofighter. Menurut seorang jurubicara angkatan laut, pasukan angkatan laut Qatar dengan jumlah kurang dari 3.000 personil diperkirakan akan bertambah menjadi 7.000 personil pada tahun 2025. Doha juga akan memulai pembangunan pangkalan angkatan laut dengan kapasitas 6.000 orang di awal 2019. Pembangunan tersebut diikuti dengan pembelian empat Corvette Italia dan *behemoth amphibious landing platform dock* (Reuters, 2018).

Dalam realisme tradisional memang *balance of power* ditekankan pada persaingan kapabilitas atau kemampuan pertahanan dalam bidang militer saja, artinya setiap peningkatan kapabilitas atau kemampuan militer negara menandakan peningkatan kekuatan dan akan ditanggapi dengan persaingan dari negara lain karena dianggap menimbulkan ancaman. Seiring berkembangnya waktu, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari kapabilitas militer saja. Bahkan menurut Kenneth Waltz, kapabilitas negara untuk mencapai keamanannya didasari oleh beberapa faktor lain, yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan politik, luas teritorial dan populasi. Seperti pada krisis diplomatik Qatar, salah satu alasan yang menyebabkan Qatar di isolasi adalah perilaku politik luar negeri dan kekuatan ekonomi Qatar. Pertumbuhan ekonomi Qatar yang sangat pesat juga menyebabkan kecemburuan negara-negara tetangganya yang lebih besar. Qatar dianggap ancaman karena memiliki kapabilitas ekonomi dan politik yang lebih unggul. Qatar berhasil menjadi negara dengan GDP tertinggi karena hasil LNG yang ia kembangkan sendiri di luar kontrol koalisi Arab Saudi. Kekayaan tersebut kemudian mendorong Qatar untuk aktif berperan dalam konflik-konflik di Timur Tengah. Qatar kerap berhasil menjadi mediator dalam konflik regional salah satunya di Lebanon. Qatar juga menciptakan media nasional, Aljazeera yang penuh intrik dengan negara-negara Teluk. Qatar memiliki kebijakan luar negeri yang independen, sehingga Qatar bebas berhubungan dengan negara atau pihak manapun. Dengan kata lain, keunggulan Qatar dalam memenuhi kapabilitas ekonomi dan politik menyebabkan negaranya disingkirkan dari koalisi Arab Saudi.

Sampai saat ini, kuartet anti Qatar belum pernah melakukan tindakan atau serangan militer. Yang mereka lakukan adalah menyerang sektor-sektor ekonomi dan politik Qatar. Ketika sektor-sektor ekonomi dan perpolitikan Qatar melemah, kuartet anti Qatar dengan mudah melampaui kapabilitas Qatar tersebut. Oleh sebab itu, dalam krisis ini persaingan yang populer adalah persaingan ekonomi dan politik. Siapa yang paling unggul di bidang tersebut akan menjadi pihak yang lebih kuat (dominan) bahkan dapat memegang stabilitas kawasan. Oleh karena itu, strategi penyeimbangan Qatar terhadap kuartet berfokus pada bidang ekonomi dan politik, meskipun Qatar juga mempersiapkan pengembangan kapabilitas militer dan bidang lainnya secara bersamaan. Hal tersebut yang juga menjadi landasan Qatar dalam mencari bantuan dari negara yang memiliki kapabilitas mumpuni dalam menciptakan keamanan bagi negaranya. Ketika kuartet anti Qatar menurunkan kapabilitas keamanan Qatar maka bekerja sama dengan negara besar memang diperlukan, kunci utama dari neorealis adalah keamanan, sehingga hubungan kerjasama antara negara besar dan kecil akan menciptakan *balance of power* yang ditujukan untuk memperkuat keamanan (Waltz, 1979).

Bagan 3.3 Bagan Penggambaran Ketidak seimbangan *Power* yang Dihadapi Qatar Ketika Krisis



Mengapa Qatar perlu melakukan *balance of power*? Dan mengapa Qatar memerlukan kerjasama dengan Iran? Hal ini tentu dapat dijawab dengan alasan karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh kuartet Anti Qatar. Berdasarkan **Bagan 3.3** di atas dapat diketahui bahwa dominasi Arab Saudi di wilayah Teluk

kemudian membentuk kuartet anti Qatar, kemudian koalisi tersebut memberikan tekanan-tekanan yang tidak seimbang dengan *power* Qatar, sehingga kondisi domestik Qatar melemah. Bagaimana tidak melemah, sebuah negara yang kecil harus menghadapi intervensi dari gabungan negara-negara yang memiliki kekuatan cukup besar di wilayah regional mereka seorang diri. Kuartet anti Qatar berharap dengan adanya sanksi blokade dan pemutusan hubungan diplomatik, Qatar akan mengakui bahwa Kuartet adalah pihak-pihak yang patut ditakuti. Kuartet anti Qatar juga berharap dengan adanya sanksi-sanksi dari kuartet Qatar dapat menyadari bahwa dirinya adalah negara yang lemah dan patut menghormati keseimbangan kekuatan di regional mereka. Sehingga harapannya, dengan adanya krisis diplomatik tersebut Qatar dapat kembali ke dalam kontrol kuartet dan tunduk dengan legitimasi-legitimasi yang mereka miliki.

Dengan kondisi yang lemah tentu saja Qatar tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi apalagi melawan kekuatan kuartet tersebut. Krisis telah memaksa Qatar mencari bantuan dan ikut membentuk aliansi, termasuk dengan Iran. Pemohonan bantuan Qatar kepada Iran ditanggapi oleh Iran melalui Menteri Luar Negerinya Javad Zarif, bahwa Iran akan mengirimkan bantuan kemanusiaan atau “humanitarian aid” kepada Qatar (IRNA, 2014). Walaupun Iran menjadi negara yang dasingkan di Teluk Arab, tetapi faktanya Iran masih menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara Teluk, utamanya Arab Saudi. Mengingat persaingan ideologi dan geopolitik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Selain itu, Iran juga menjadi pusat perhatian global akhir-akhir ini karena program nuklir yang ia kembangkan. Sehingga memiliki hubungan khusus dengan Iran akan menarik banyak perhatian yang berbagai pihak. Dan bagi Qatar, Iran dapat menambah *power* nya untuk menghadapi Kuartet anti Qatar.

Keyakinan Doha untuk bergabung dengan Teheran karena Doha merasa Teheran mampu menarik banyak perhatian dan pertimbangan terutama dari kuartet anti Qatar untuk menyelesaikan kerusuhan regional yang mereka ciptakan sesegera mungkin. Karena dengan menguatnya hubungan Qatar dan Iran, salah satu hasil yang muncul untuk jangka panjang adalah perpecahan yang lebih permanen untuk kubu Sunni, dimana Qatar pendukung utama Ikhwanul Muslimin akan bergerak

bersama afiliasi Islamis lainnya lebih dekat ke Iran dan menjauh dari koalisi sunni tradisionalnya. Dampak keberpihakan Qatar dengan Iran dapat jauh mencapai implikasi negatif bagi perang sipil di Suriah dan Libya, dimana beberapa dari kuartet anti Qatar terutama Arab Saudi, UEA, dan Mesir memiliki konsentrasi yang cukup tinggi untuk menyudahi konflik sipil di wilayah tersebut. Bahkan hal tersebut akan membawa Iran untuk bersatu dengan kubu-kubu Islamis. Keberpihakan Qatar kepada Iran juga akan membawa pengaruh Iran di dunia Arab akan semakin intens sehingga kesenjangan di kalangan Sunni semakin meningkat, kondisi yang semua orang rasa tidak akan diterima oleh Arab Saudi. Dan keadaan ini menyebabkan piha Kuartet anti Qatar untuk bertindak lebih hati-hati dan memutar langkah untuk berusaha merebut kembali Qatar, hal ini terbukti ketika Kuartet anti Qatar merubah 13 tuntutan yang sebelumnya diajukan melalui mediasi oleh Kuwait menjadi enam prinsip yang diumumkan pada 6 Juli 2017 di Kairo, Mesir : (Khouri, 2017)

SIX 'PRINCIPLES'

1. Commitment to combat extremism and terrorism in all their forms and to prevent their financing or providing havens.
2. Suspending all acts of provocation and speeches inciting hatred or violence.
3. Full compliance with the Riyadh Agreement of 2013 and the supplementary agreement and its implementation mechanisms of 2014 within the framework of the Gulf Cooperation Council.
4. Adherence to all the outcomes of the Arab Islamic American Summit held in May 2017 in Riyadh.
5. Refraining from interfering in the internal affairs of states and from supporting illegal entities.
6. The responsibility of all states of the international community to confront all forms of extremism and terrorism as a threat to international peace and security.

-Khouri, G. Rami, 2017. The turning point of the GCC crisis. AlJazeera-

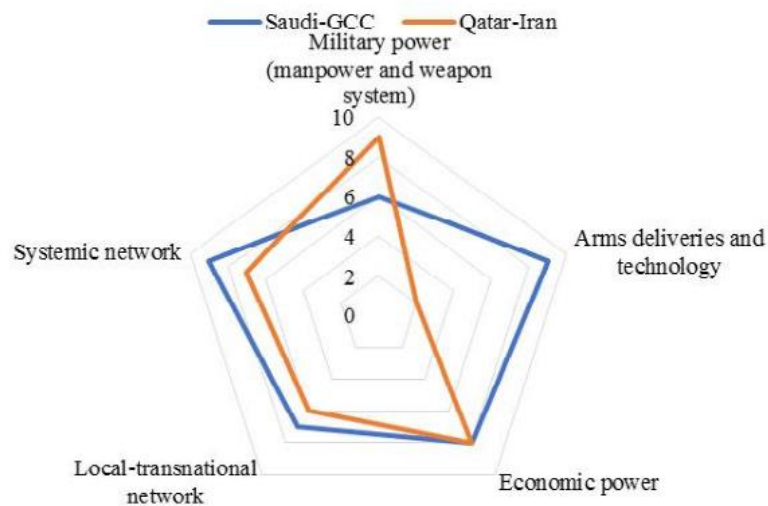
Keenam prinsip tersebut dibentuk atas tanggapan penolakan Qatar terhadap 13 syarat yang diajukan oleh Kuartet anti Qatar sebelumnya, yang menurut Qatar melanggar ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional, salah satunya adalah kebebasan beraspirasi dan pers karena Qatar diminta untuk menutup Al-Jazeera, dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara karena kuartet mengintervensi Doha untuk tidak berhubungan dengan Iran, dimana seharusnya hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain harusnya berdasarkan kehendak dan kewenangan

negara itu sendiri bukan kehendak negara lain. Selain itu enam prinsip tersebut dikeluarkan setelah kuartet mengetahui bahwa hubungan Qatar dan Iran malah semakin dekat, dengan tindakan Iran yang mengirimkan pasokan makanan dan membuka *airspace* nya untuk Qatar serta setelah diketahui bahwa Qatar dan Iran mulai melakukan kontak untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekitar bulan Juni 2017.

Keenam prinsip secara khusus dibentuk untuk mencapai tuntutan kedua belah pihak, serta mencapai komitmen global untuk memerangi terorisme dan kekerasan politik. Kuartet anti Qatar secara signifikan memasukkan referensi perjanjian Riyadh 2013/2014 dan 2017 tentang masalah-masalah ini yang telah disetujui oleh keenam negara GCC, sehingga semua pihak dapat bergerak maju ke resolusi dengan menegaskan kembali posisi yang telah mereka terima. Secara tersirat, pembentukan keenam prinsip ini menjadi upaya lanjutan untuk memulihkan hubungan diplomatik Qatar dengan Kuartet. Setelah diterbitkannya enam prinsip tersebut, Qatar tidak secara langsung menanggapi hal tersebut secara resmi. Dibalik hal tersebut Qatar masih bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan terorisme, tuntutan dan prinsip-prinsip tersebut seolah menggiring Qatar untuk mengakui tuduhan yang menurut Qatar tidak tentu benar. Oleh sebab itu, Qatar menyatakan masih memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis dengan kapabilitas dan strateginya tersendiri, tanpa harus menuruti tuntutan kuartet (Lemon, 2017).

Lalu bagaimana kekuatan Qatar dan Iran dapat menyeimbangi kekuatan kuartet anti Qatar? Seorang akademisi hubungan internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo telah melakukan pengukuran komparasi kekuatan yang dimiliki oleh Qatar-Iran dengan koalisi Arab Saudi. Perhitungan kekuatan kedua pihak yang berseteru dipertimbangkan berdasarkan lima hal, yaitu : kekuatan militer, kekuatan ekonomi, penguasaan persenjataan (non-nuklir), jejaring lokal-transnasional, dan jejaring sistemik (Wardoyo, 2018). Hasil perhitungannya sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Komparasi Kekuatan Dua Pihak yang Berseteru dalam Krisis Diplomatik Qatar



Sumber : Wardoyo, Broto 2018, Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk , Jurnal Hubungan Internasional, vol. 7, no. 1, pp. 90-91, dilihat 25 Mei 2019, < <https://doi.org/10.18196/hi.71127>>

Hasil komparasi tersebut menjelaskan bahwasanya jika berdiri sendiri Qatar akan menghadapi kondisi ketidakseimbangan kekuatan atau *asymmetric of power* dan memaksa Qatar untuk memilih tunduk terhadap tuntutan kuartet anti Qatar. Jika dihadapkan dengan kuartet anti Qatar seorang diri maka Qatar akan menghadapi ketimpangan total PDB, kekuatan militer, maupun penguasaan teknologi persenjataan. Namun keadaan tersebut dapat berubah ketika Iran dilibatkan dalam rivalitas tersebut. Kedekatan Qatar dengan Iran sangat perlu dipertimbangkan, karena dengan menggabungkan kekuatan kedua negara tersebut, kehadiran Iran secara signifikan mempengaruhi peningkatan kekuatan semua indikator dalam radar komparasi tersebut. (Wardoyo, 2018) Dari hasil komparasi di atas akan dipaparkan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Wardoyo. Peneliti juga akan menambahkan beberapa peningkatan yang terjadi di beberapa sektor yang memungkinkan peningkatan kekuatan Qatar-Iran untuk semakin mampu menyeimbangkan kekuatan kuartet anti Qatar.

Berikut beberapa peningkatan kekuatan Qatar dalam konstelasi perimbangan yang dapat dirubah secara signifikan akibat keterlibatan Iran di kubu Qatar. Pertama, kekuatan jejaring lokal-transnasional, Iran adalah negara yang dianggap musuh oleh koalisi Arab Saudi. Iran dan Saudi sendiri kerap terlibat dalam pertarungan di berbagai front di kawasan Timur Tengah, antara lain : pertarungan faksi-faksi Sunni melawan faksi-faksi Syiah di Irak; pertarungan faksi-faksi pro pemerintah melawan faksi-faksi pemberontak di Suriah; pertarungan dan gesekan berkepanjangan antara kelompok Sunni dengan Hizbullah di Lebanon; pertarungan antara blok pro pemerintah melawan afiliasi Houthi Tehran di Yaman (Wardoyo, 2018). Selain itu, Qatar juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan kekuatan Ikhwanul Muslimin, suatu organisasi yang dianggap koalisi Arab Saudi sebagai kelompok yang dapat mendestabilisasi kawasan terutama di Mesir. Qatar juga kerap kali melampaui dominasi negara-negara besar dalam koalisi Arab Saudi dengan menjadi mediator konflik regional. Qatar telah muncul sebagai salah satu mediator paling proaktif di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Qatar telah memosisikan dirinya sebagai pembuat perdamaian yang netral di banyak konflik internasional dan intra-nasional yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Lebanon, Sudan, dan Yaman merupakan tiga kasus yang paling menonjol di mana ia melibatkan dirinya. Qatar telah membuktikan diri sebagai mediator yang cakap dalam mengurangi ketegangan dalam menyelesaikan konflik. (Kamrava, 2011) Hasilnya *soft power diplomacy* Qatar-Iran di Timur Tengah tersebut setidaknya dapat disejajarkan dengan kekuatan koalisi Arab Saudi, bahkan dapat melampauinya untuk beberapa waktu mendatang.

Menurut Broto Wardoyo, jika melihat dari jumlah pasukan dan kepemilikan (kuantitas) persenjataan, gabungan kekuatan Iran dengan Qatar mengungguli aliansi Saudi. Untuk menyederhanakan penjabaran, dalam kapabilitas militer dan persenjataan, peneliti mengomparasikan dua kekuatan terbesar dalam rivalitas ini, yaitu Iran dan Arab Saudi. Melansir dari hasil komparasi Wardoyo yang didasarkan pada data Military Balance tahun 2016, jumlah tentara yang dimiliki Iran lebih dari dua kali lipat jumlah tentara yang dimiliki Arab Saudi. Sementara jumlah persenjataan darat Iran dan Arab Saudi hampir berimbang. Iran memiliki 3.028 peralatan tempur darat, jumlah yang lebih rendah dibandingkan peralatan tempur

yang dimiliki Arab Saudi yaitu sebanyak 3.378 buah. Namun, kuantitas tidak selamanya menentukan kualitas, Iran memiliki kekuatan tank yang jauh lebih unggul dibandingkan Arab Saudi. Secara kualitas dan kuantitas teknologi tank Iran jauh lebih unggul, secara kuantitas Iran memiliki 1.663 tank induk sedangkan Arab Saudi hanya 730 tank. Kemudian kekuatan pertahanan udara keduanya seimbang dengan kisaran kepemilikan 340 pesawat dengan berbagai tipe. Sementara kekuatan pertahanan laut Iran dua kali lipat lebih kuat daripada Saudi. Mungkin untuk peralatan pertahanan ini Iran tertinggal dalam hal modernisasi militer, sanksi keuangan yang menimpa Iran menyebabkan negara ini tidak dapat menyalurkan banyak dana untuk modernisasi persenjataan, Arab Saudi mengungguli dengan menggelontorkan 16 miliar USD untuk pengadaan senjata periode 2011-2014 sedangkan Iran hanya menghabiskan 6 miliar USD. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Qatar. Seperti penjelasan sebelumnya, Attiyah Menteri Pertahanan Qatar telah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk modernisasi militer milik Qatar, sehingga keseimbangan kekuatan Qatar-Iran melawan kuartet masih bisa dicapai.

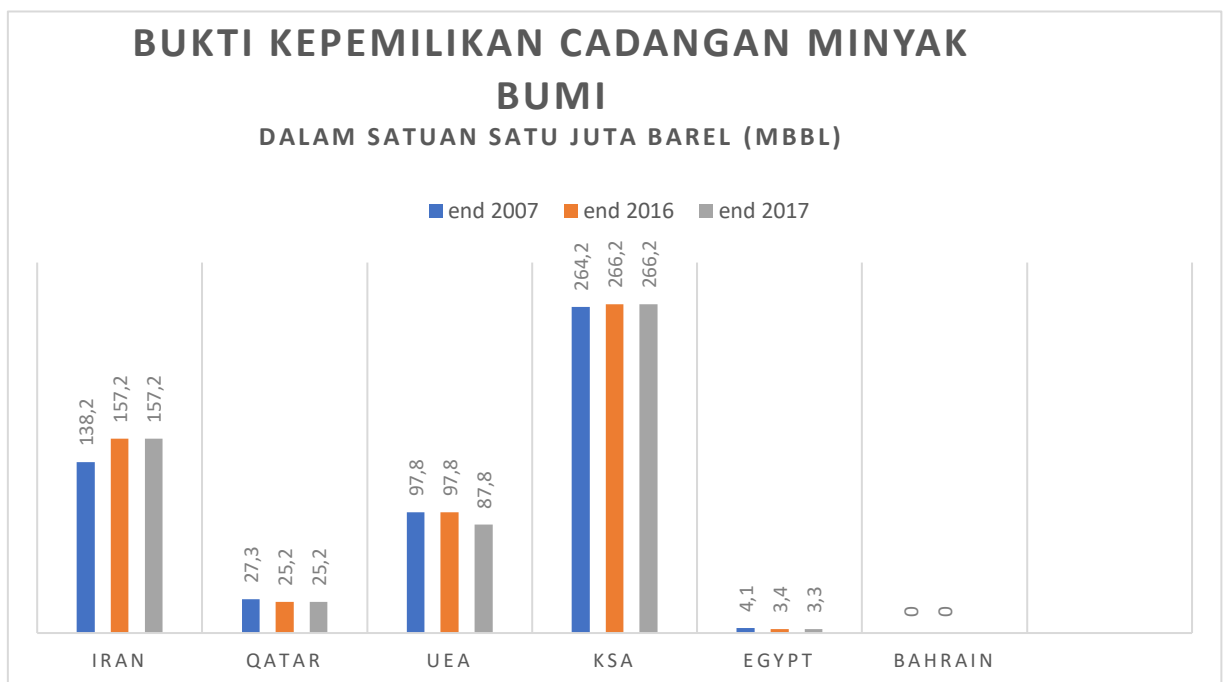
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan Arab Saudi

Subjects	Iran	Saudi Arabia
GFP Rank	14 (of 137)	25 (of 137)
Total Population	83,024,745	33,091,113
Manpower Available	47,324,105	17,703,745
Fit-for-Service	39,842,164	16,198,927
Reaching Military Age	1,394,476	583,161
Active Personnel	523,000	230,000
Reserve Components	350,000	0
Total Military Personnel	873,000	230,000

Sumber : www.globalfirepower.com

Selain hasil komparasi di atas, koalisi Qatar-Iran bisa menyeimbangi kekuatan kuartet anti Qatar jika diukur dari kemampuan atau kapabilitas sumber daya energi yang mereka miliki. Timur Tengah adalah terkenal dengan negara-negara strategis karena memiliki cadangan sumber daya energi terbesar di dunia. Energi yang paling populer dihasilkan adalah minyak dan gas alam. Jika dikomparasikan, kubu Qatar-Iran memiliki cadangan minyak lebih sedikit dibandingkan kubu kuartet anti Qatar. Sampai akhir tahun 2017, Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,2 juta barrel sedangkan Iran sebanyak 157,2 juta barrel. Arab Saudi masih memimpin sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar yaitu sebanyak 266,2 juta barrel. UEA memiliki cadangan minyak lebih sedikit daripada Iran yaitu sebanyak 87,8 juta barrel. Mesir jauh lebih sedikit yaitu hanya 3,3 juta barrel. Dan Bahrain tidak memiliki cadangan minyak sama sekali. Untuk ketersediaan cadangan minyak ini, kekuatan atau kemampuan Qatar-Iran masih dapat dikatakan seimbang dengan kekuatan atau kemampuan kuartet anti Qatar.

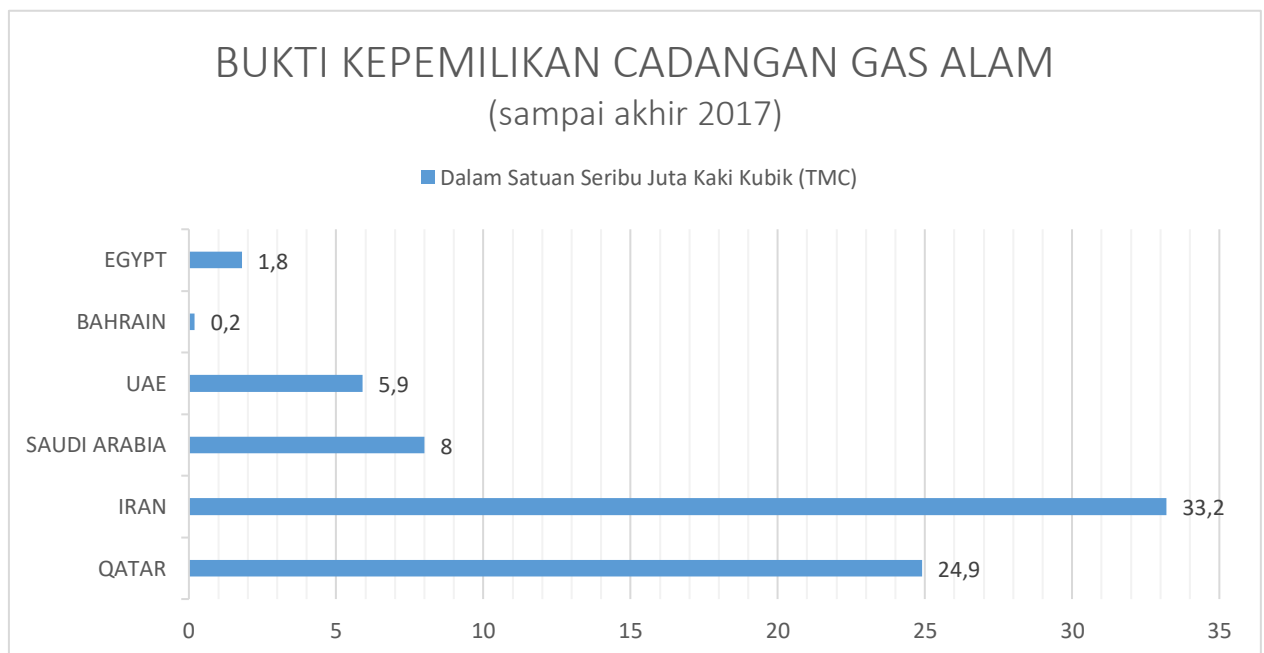
Grafik 3. 1 Grafik Komparasi Ketersediaan Cadangan Minyak Negara-Negara yang Berkonflik



**Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti Berdasarkan Data dari BP
Statistical Review of World Energy Juni 2018 edisi 67**

Walupun sedikit tertinggal dalam jumlah cadangan minyak, Qatar-Iran jauh melampaui kemampuan kuartet anti Qatar dalam sektor Gas Alam. Qatar dan Iran memang terkenal berbagi ladang gas alam terbesar di dunia, tak heran jika mereka dapat menumbuhkan ekonominya dengan cepat berkat ladang gas tersebut, terutama Qatar. Menurut data BP Statistical Review of World Energy, sampai akhir tahun 2017 Qatar-Iran memiliki jumlah cadangan gas yang jauh lebih tinggi daripada akumulasi cadangan gas yang dimiliki kuartet sekalipun. Natural gas ini pula yang menjadi faktor hubungan dekat antara Qatar dan Iran, juga yang telah membentuk Qatar menjadi negara terkaya sehingga meningkatkan power politiknya juga di kawasan. Untuk cadangan gas alam, Iran memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 33,2 triliun meter kubik, disusul Qatar sebesar 24,9 triliun meter kubik. Sedangkan dari blok kuartet Arab Saudi memegang 8 triliun meter kubik cadangan gas alam, kemudian UEA sebesar 5,9 triliun meter kubik, lalu Mesir sebesar 1,8 triliun meter kubik, dan Bahrain hanya sebesar 0,2 triliun meter kubik. Oleh karena itu, Qatar-Iran masih mampu untuk menyeimbangi kuartet dalam kemampuan energi ini.

Grafik 3. 2 Komparasi Cadangan Gas Alam yang Dimiliki masing-masing negara yang sedang berkonflik



Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti Berdasarkan Data dari BP Statistical Review of World Energy Juni 2018 edisi 67

Berdasarkan hasil komparasi tersebut dan setelah melalui banyak pertimbangan, pemerintah Qatar menyadari bahwa negara itu masih memiliki peluang untuk menjalankan kebijakan negaranya yang mandiri. Qatar telah muncul sebagai kekuatan dominan mengenai semua masalah yang berkaitan dengan ekonomi regional. Bergabung bersama Iran dapat membuat Qatar melepaskan diri dari jerat tekanan kuartet anti Qatar, melalui adanya fakta bahwa gabungan kekuatan Qatar-Iran dapat menyeimbangkan kekuatan kuartet ditambah sebagai negara yang kaya, Qatar tidak akan merasakan kesulitan keuangan dalam waktu dekat dikarenakan Qatar memiliki dana kekayaan negara lebih dari \$ 300 miliar (untuk populasi yang berjumlah sekitar 300.000 warga). Juga karena semua perekonomian di GCC sifatnya sangat mirip yaitu dengan bergantung pada ekspor energi. Qatar masih memiliki ladang gas terbesar di dunia, dan Qatar masih memiliki aktivitas perekonomian yang jauh lebih intens dengan negara-negara minyak lainnya dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, kecuali hanya UEA yang menjadi mitra dagang teratas dengan Qatar. Akhirnya, para pemimpin Qatar telah berkomitmen untuk tidak “menyerah” pada persyaratan dari kuartet anti Qatar. (Gordon, et al., 2017)

Posisi kedua belah pihak dengan demikian menunjukkan perselisihan di kawasan Teluk dapat dengan mudah berlanjut untuk beberapa waktu, dan akan terus menjadi perhatian semua pihak yang tertarik pada stabilitas kawasan. Keberpihakan Qatar dengan Iran membawa peningkatan *power* bagi Qatar dalam menghadapi kuartet anti Qatar. Setidaknya dengan beraliansi dengan Iran, Qatar dapat mencapai *balance of power* atau menyeimbangkan kekuatannya dengan kuartet anti Qatar. Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan konsep *bandwagoning* sebagai bentuk *balance of power* yang dilakukan Qatar untuk menghadapi tekanan Kuartet anti Qatar. Lalu bagaimana *Bandwagoning* dapat bekerja pada hubungan Qatar dan Iran? Melalui Bagan Alur kerja selanjutnya untuk menjelaskan keputusan Qatar dalam melakukan *balance of power* sebagai solusi atas *security dilemma* yang dihadapinya pasca krisis, melalui strategi *Bandwagoning*. Dalam hal ini Qatar bersama Iran akan menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Arab Saudi beserta koalisi kuartet anti Qatarnya.

Memang, Iran adalah penerima manfaat utama dari krisis Qatar yang sedang berlangsung. Qatar telah dipaksa untuk secara cepat mengembangkan hubungan ekonominya dengan Iran untuk menghindari embargo yang dipimpin Saudi. Secara politis, krisis telah memberi Iran lebih banyak ruang untuk bermanuver di Teluk, khususnya dalam menjangkau Qatar, namun dengan bergabung bersama negara agresor seperti Iran, maka Qatar berharap dapat mengamankan dirinya dari serangan atau ancaman kuartet anti Qatar. Dengan kata lain, berarti negara memilih untuk bergabung dengan negara yang paling mengancam dan melakukan strategi *bandwagoning*.

3.1.3 Apakah Qatar dan Iran Beraliansi ?

Sebelum masuk ke analisis *bandwagoning* antara Qatar dan Iran, ada baiknya jika terlebih dahulu dipaparkan pembuktian bahwa Qatar dan Iran beraliansi. Hal ini dikarenakan *Bandwagoning* akan secara efektif bekerja apabila kedua belah pihak merupakan aliansi. Lalu apakah Qatar dan Iran adalah sekutu? Tidak ada keraguan bahwa hubungan bilateral dan aliansi antara Qatar dan Iran semakin tumbuh dan menguat dikala kedua negara tersebut bersama-sama menghadapi krisis diplomatik Qatar tahun 2017 silam. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarid, pemutusan hubungan diplomatik yang disertai dengan blokade oleh Kuartet anti Qatar telah membawa Qatar menjadi lebih dekat dengan Iran. Akibat sanksi-sanksi dan tekanan yang diberikan oleh kuartet, hubungan sekutu antara Qatar dan Iran perlahan namun pasti semakin menguat. Blokade telah menyebabkan Qatar terisolasi dan menerima dampak-dampak buruk seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Momentum ini dapat dikatakan menjadi puncak dari menguatnya kembali aliansi antara Qatar dan Iran. Krisis Diplomatik rupanya telah menempatkan Qatar pada posisi yang cukup baik. Negara kecil ini dapat mendekati diri kepada Iran tanpa melaksanakan satupun tuntutan yang diajukan oleh kuartet anti Qatar sebagai syarat untuk pemulihan hubungan diplomatik diantara mereka. Aliansi dengan kekuatan ini memungkinkannya untuk melawan ancaman dari kuartet dan untuk menyeimbangkan tekanan dari tetangga-tetangga GCCnya yang lebih kuat.

Aliansi antara Qatar-Iran di kawasan Teluk merupakan aliansi yang terbentuk dengan cukup hati-hati. Memburuknya hubungan Arab Saudi dan Iran menempatkan Qatar pada posisi yang sulit, mengingat dekatnya hubungan Qatar dengan Arab Saudi dan kuatnya hubungan politik ekonomi dengan Iran. Sebagai negara kecil, Qatar terancam dalam konflik antara Teheran dan Riyadh. Oleh karena itu, hubungan antara Qatar dan Iran selalu menjadi sorotan Arab Saudi dan Negara-Negara kuartet anti-Qatar lainnya. Mereka menilai Iran adalah kekuatan yang mengancam keamanan di kawasan. Hal ini yang menyebabkan hubungan sekutu antara Qatar dan Iran jarang tertuang dalam perjanjian hitam diatas putih. Meski begitu, kedua negara ini sampai saat ini masih dapat mempertahankan hubungan yang sangat baik dan menunjukkan loyalitas satu sama lain. Oleh karena itu, menurut hasil penelitian, ada beberapa hal yang mengikat keutuhan aliansi Qatar-Iran sekaligus yang menjamin loyalitas hubungan dua negara ini, antara lain:

- 1) Qatar memiliki hubungan ekonomi yang strategis dengan Iran terkait dengan ladang gas bersama dan memiliki batas maritim dengan Iran (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019). Ladang gas North Dome merupakan aset ekonomi yang menjadi andalan Negara kecil berpenduduk sekitar 300.000 orang ini (Voice of America, 2010). Ditambah ladang gas tersebut merupakan ladang gas terbesar di dunia yang harus dibagi dengan Iran, dikarenakan ladang gas tersebut berbatasan langsung dengan wilayah maritim kedua negara ini. Iran dapat menjadi kekuatan yang sangat mengancam keamanan nasional dan sektor gas Qatar apabila kedua negara ini memiliki hubungan saling berselisih. Hal ini pernah terjadi di tahun 1991 ketika Iran pertama kali menemukan bagian ladang gas nya yaitu South Pars namun reda setelah keduanya menandatangani perjanjian dermakasi di tahun 1996 (Dargin, 2008), mengingat sektor gas ini merupakan aset yang sangat vital bagi pertahanan negara Qatar maka Qatar akan terus membutuhkan hubungan baik dengan Teheran. Sehingga Qatar tidak akan pernah mengucilkan Iran, karena hal tersebut akan membahayakan hubungan yang mendasari perkembangan ekonomi Qatar.
- 2) Ekonomi memang menjadi hal yang mendasari kuatnya hubungan antara Qatar dan Iran. Dalam hasil analisis peneliti, Qatar akan rela memberikan

loyalitasnya kepada negara yang memiliki jasa dalam pertumbuhan ekonomi Qatar. Hal tersebut juga diamini oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Qatar tahun 2012-Januari 2016, HE. Deddy Saiful Hadi. Dalam wawancara bersama peneliti, Bapak Dubes membenarkan bahwa kekuatan politik, penunjang keberhasilan diplomasi Qatar di kawasan, dan kekuatan Qatar lainnya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi Qatar. Kekuatan ekonomi yang telah mendorong Qatar untuk tampil di panggung regional (Hadi, 2019). Sehubungan dengan Iran, selain karena ladang gas, integrasi Qatar-Iran dalam hal ekonomi lainnya adalah kehadiran warga negara Iran di Doha yang membentuk sekitar 10 persen dari pekerja asing di Qatar. Para pedagang dan pengusaha Iran menjalankan bisnis yang sukses di Doha, bahkan di ibukota Qatar dibangun pasar utama yang disebut Bazaar Iran (Majidyar, 2013). Selain itu, Qatar dan Iran juga menjalin kerjasama di bidang-bidang ekonomi vital lainnya yang akan lebih dijelaskan dibahas mekanisme hubungan bilateral Qatar-Iran di bawah ini. Oleh karena itu, secara umum Iran memiliki kehadiran yang kuat di Doha, dan ikatan mereka ini menandakan bahwa hubungan bilateral mereka sulit untuk diakhiri.

- 3) Qatar dan Iran juga kemungkinan besar akan terus terikat dalam hubungan yang loyal dan berdedikasi satu sama lain karena posisi terhimpit Qatar di kawasan. Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang terbentuk sejak 1981, terbukti tidak berdaya dalam krisis Kuwait 1990, yang menyebabkan semua negara anggota GCC kemudian menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat (Furtig, 2017). Seperti yang dijelaskan pada Bab 2, Qatar memiliki jejak sejarah yang buruk mengenai hubungan antar negara-negara GCC sehingga Qatar memiliki posisi yang sangat rentan. Satu-satunya harapan negara yang mampu tetap menjadi sekutu baik bagi Qatar adalah Iran. Bagaimanapun, dengan posisi rentannya di kawasan, Qatar tidak mungkin membahayakan huungannya dengan Iran.
- 4) “Velayat of the Emir” telah menjadi kunci paling penting untuk memahami hubungan kuat Qatar-Iran. Hal inilah yang membentuk aliansi antara pemimpin tertinggi di Teheran dan dua petinggi Qatar (Emir Sheikh Hamad dan mantan Perdana Menteri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Alt-thani)

di Doha (Naji, 2012). Velayat of the Emir sendiri merupakan proses pengambilan keputusan di Doha berada di bawah kendali penuh dari perwalian Father-Emir. Suatu proses kebijakan yang diimitasi dari kebijakan Iran yaitu “Velayat e Faqih” atau perwalian ahli hukum Iran. Sistem velayat ini mulai muncul sejak pendahulu Emir Qatar saat ini, yaitu Emir Hamad. Saat ini hal ini masih dijalankan oleh putranya, Emir Tamim bin Hamad Al Thani yang memainkan peran pemimpin yang sama seperti presiden Iran, Rouhani (Naji, 2012). Hal ini menciptakan cara pandang, cara pengambilan keputusan, dan proses kebijakan luar negeri yang sama antara Qatar dan Iran. Berdasarkan hal tersebut memungkinkan untuk menjelaskan beberapa aspek dukungan Iran untuk Qatar dalam krisis diplomatiknya. Iran percaya bahwa Qatar berada di bawah tekanan yang sama dengan Qatar, yang kemudian menumbuhkan rasa empati, sama rasa, dan loyalitas yang lebih kental antar kedua negara.

- 5) Dalam rangka memperjuangkan strategi untuk mempertahankan hubungan dengan "*friend and foe*" untuk menjadi pihak yang sangat diperlukan dan menjadi penggerak mediator kawasan, hubungan baik dengan Iran merupakan cara yang tepat untuk mencapainya. Strategi ini telah terbukti berhasil beberapa kali di masa lalu seperti keberhasilannya di Lebanon, Sudan dan Yaman. Namun Qatar juga sering dikritik karena "kesewenang-wenangan" dari posisinya dan kerap dituding melakukan manuver politik oleh negara-negara besar di Teluk Arab (Furtig, 2017). Dan kali ini, Qatar ingin meningkatkan peran tersebut kembali dengan menggandeng Iran sebagai sekutunya, bahwa Qatar mampu bertahan menjalin sekutu dengan salah satu negara berpotensi menjadi agresor di kawasannya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian tercipta prioritas kebijakan luar negeri Qatar adalah mengedepankan hubungan persaudaraan dan persatuan (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019). Pemerintah Qatar terus berupaya memposisikan dirinya sebagai negara yang cinta damai dan mediator pertikaian di kawasan (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019). Sehingga tidak lepas, bahwa menjaga hubungan persaudaraan yang baik dengan Iran adalah hal yang terus menjadi penting bagi Qatar.

Untuk lebih memperkuat pembuktian hubungan saling bersekutu antara Qatar dan Iran, maka peneliti akan memaparkan mekanisme hubungan bilateral Qatar-Iran melalui data-data kerjasama dibidang penting lainnya yang dapat menunjang kuatnya aliansi mereka. Qatar dan Iran memiliki jejak sejarah yang tidak mudah untuk bisa bertahan sampai sekarang. Menjadi kewajaran jika di masa lampau hubungan kedua negara ini mengalami fluktuasi, karena pada beberapa waktu dan peristiwa kedua negara ini memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, seperti pada peristiwa perang Irak-Iran, dimana Qatar sempat mendukung pertahanan Irak dan mengecam Iran. Kemudian mengenai pandangan tentang Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik dengan Qatar sedangkan dengan Iran, Amerika Serikat adalah rival. Untuk menganalisis pola aliansi antara kedua negara ini diperlukan pemikiran yang netral dan spesifik. Harus disadari bahwa kedua negara ini terpisah dalam blok yang berbeda di kawasan, Qatar juga sempat tidak memihak Iran karena dalam beberapa peristiwa Qatar masih tergabung dalam koalisi yang notabenenya melawan Iran. Tetapi tidak jarang juga keduanya memiliki hubungan yang saling memihak. Tujuan peneliti untuk memaparkan hubungan naik turun Qatar dan Iran dimasa lampau adalah untuk menekankan bahwa kedua negara ini terbukti mampu tetap mempertahankan hubungan bilateral yang sangat baik meskipun pernah terlibat konflik regional yang menempatkan kedua negara dalam posisi saling berhadapan. Artinya, kedua negara ini tidak melihat adanya niat untuk meletakkan hubungan mereka ke dalam tensi yang buruk, dan juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi tumbuhnya loyalitas diantara keduanya. Berikut tabel kronologi fluktuasi hubungan Qatar-Iran tersebut disajikan :

Tabel 3. 2 Tabel Fluktuasi Hubungan Qatar-Iran

KRONOLOGI FLUKTUASI HUBUNGAN QATAR-IRAN	
TAHUN/WAKTU	PERISTIWA
1979	Terjadi Revolusi Iran yang menyingkirkan Shah Iran. Terbentuk dua pilar di Teluk Arab (Sunni dan Syiah) , mulai terjadi persaingan antara Arab Saudi beserta koalisi vs Iran. Qatar menghargai arab Saudi dengan mengikuti kebijakan OPEC saat itu untuk tidak mendukung Iran.

	Walaupun sebelum revolusi Iran, Qatar memiliki “friendly relation” dengan Iran.
1980	Meletusnya perang Irak-Iran. Negara Teluk meningkatkan kewaspadaannya atas peristiwa tersebut, baik Irak atau Iran memiliki potensi untuk menghancurkan monarki di Teluk.
30 September 1980	Qatar sebagai salah satu negara Arab yang ikut mendukung Irak bersama dengan Raja Hussein di Yordania
11 Oktober 1980	Menteri Luar Negeri Qatar, berbicara di Baghdad, menegaskan kembali solidaritas Qatar dengan Irak.
Februari 1981	Iran menuduh Qatar dan negara-negara Teluk lainnya diam-diam membiayai kampanye militer Irak.
Desember 1981	Dewan Kerjasama Teluk (GCC) meningkatkan pengaturan keamanan setelah muncul dugaan upaya kudeta di Bahrain oleh oposisi yang didukung Iran.
21 Desember 1981	The Washington Post melaporkan bahwa Qatar adalah lima diantara Negara Teluk yang memberikan pinjaman ± \$16 miliar ke Irak sejak dimulainya Perang Iran-Irak.
7 Februari 1982	Qatar dan lima negara Teluk lainnya memperingatkan Iran atas tindakan subversif lebih lanjut di Teluk setelah kudeta yang gagal di Bahrain. Mereka menekankan tidak mau semakin memperburuk hubungan mereka dengan Iran
1 Juni 1982	Qatar dan negara-negara Teluk sepakat untuk menyatakan netralitas dalam Perang Iran-Irak, meskipun negara-negara tersebut tidak sepenuhnya menghentikan bantuan-bantuan ke Irak.
12 Maret 1984	Setelah melakukan perundingan di Riyadh selama 2 hari, Qatar dan GCC memperbarui dukungan untuk Irak dalam perang
1986	Iran mendukung klaim Qatar terhadap Bahrain atas Pulau Fasht al Dibal yang diperebutkan.
26 Oktober 1987	Qatar mengutuk serangan rudal Iran di wilayah Kuwait, tetapi tidak menyerukan sanksi hukuman.
30 Desember 1987	Qatar mendesak PBB untuk menerapkan sanksi terhadap Iran setelah penolakan Teheran untuk mematuhi gencatan senjata dalam perang Irak-Iran.
20 Agustus 1988	Iran dan Irak mengakhiri gencatan senjata dalam perang.

13 November 1990	Qatar dan Iran menyetujui investasi bersama sebesar \$ 3 miliar untuk memulai pengembangan ladang gas Pars Selatan pada tahun 1994.
26 November 1990	Iran membatalkan larangan pembelian minyak langsung dari Qatar. Larangan itu diberlakukan sebagai tanggapan atas dukungan negara-negara GCC untuk Irak dalam perang.
1992	Pertikaian perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar mendorong Doha untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan Iran.
3 April 1994	The Washington Post melaporkan hubungan Qatar dan Iran semakin dekat karena adanya kesepakatan perdagangan. "Kami memiliki hubungan baik dengan Iran, karena Iran belum melakukan apa pun terhadap Qatar," kata Menteri Luar Negeri Qatar Hamad bin Jassim bin Jabir.
27 Juni 1995	Putra Mahkota Hamad Bin Khalifa al Thani memimpin kudeta tak berdarah melawan ayahnya.
5 Juni 1996	Bahrain menangkap 44 tersangka dalam rencana kudeta yang didukung oleh Iran. Qatar bergabung dengan negara-negara GCC lain dalam mengecam tindakan tersebut.
11 Juni 1997	Selama kunjungan ke Amerika Serikat, Sheikh Qatar Hamad bin Khalifa mengkritik kebijakan AS terhadap Iran, mendesak kepemimpinan AS untuk menerima pemulihan hubungan dengan Iran dan presiden barunya, Mohammad Khatami.
Mei 1999	Presiden Iran Khatami mengunjungi Qatar selama kunjungan dalam agenda untuk memperbaiki hubungan dengan dunia Arab.
2006	Qatar dan Iran masing-masing menjanjikan \$ 50 juta untuk mendukung Hamas setelah kemenangannya dalam pemilihan parlemen di Palestina.
31 Juli 2006	Qatar memberikan suara menentang resolusi Dewan Keamanan AS yang menuntut agar Iran menghentikan pengembangan nuklir, dengan alasan perlunya memberi Iran lebih banyak waktu untuk memberikan respon. Qatar adalah satu-satunya negara di Dewan Keamanan yang memberikan suara menentang resolusi.
31 Desember 2006	Qatar bergabung dengan suara bulat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran untuk program nuklirnya. Perwakilan Qatar mengatakan Iran memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; Qatar mendukung sanksi untuk mencegah proliferasi nuklir di Timur Tengah.

21 Mei 2008	Qatar memperantarai kesepakatan antara koalisi pemerintahan yang didukung Saudi-Lebanon dan oposisi yang didukung Iran yang dipimpin oleh Hezbollah, serta mengakhiri krisis politik 18 bulan di Lebanon.
24 Februari 2010	Iran dan Qatar menandatangani pakta pertahanan untuk memerangi dorongan terorisme dan pakta keamanan maritim.
2011	Konflik Suriah pecah. Qatar secara bertahap terlibat untuk intervensi Suriah, awalnya Qatar hanya sebagai pengamat konflik di Suriah tetapi kemudian diketahui bahwa Qatar berangsur-angsur mendanai kelompok-kelompok pemberontak di Suriah. Doha menyediakan senjata kecil dan membiayai kelompok oposisi tetapi menolak mempersenjatai kelompok-kelompok oposisi dengan persenjataan berat.
5 September 2011	Emir Qatar mengunjungi Iran untuk mendesak Teheran menekan Presiden Assad agar menghentikan serangan terhadap para pengunjung rasa.
25 September 2012	Amir Qatar menyerukan pembentukan koalisi Arab untuk menegosiasikan transisi politik.
Oktober 2012	Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani menjadi kepala negara asing pertama yang mengunjungi Jalur Gaza sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2006. Banyak analis menafsirkan langkah itu sebagai upaya untuk melemahkan pengaruh Iran.
5 November 2012	Departemen Pertahanan A.S. memberi tahu Kongres tentang kemungkinan penjualan sistem pertahanan rudal ke Qatar. Qatar memesan rudal tersebut ke Unit Fire THAAD di tengah meningkatnya kekhawatiran regional atas ambisi Iran.
26 Maret 2013	Qatar menjadi tuan rumah KTT Liga Arab di Doha dan mendukung upaya yang berhasil memberikan kursi Suriah ke oposisi Koalisi Nasional Suriah
25 Juni 2013	Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani, mengundurkan diri demi putra keempatnya, Tamim bin Hamad al Thani yang berusia 33 tahun.
22 Januari 2014	Pada konferensi perdamaian di Suriah, Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya memandang Iran sebagai hal yang penting untuk menyelesaikan krisis.
6 Januari 2016	Qatar memanggil duta besarnya untuk Teheran dalam solidaritas dengan Arab Saudi setelah pemrotes menyerbu Kedutaan Besar Saudi di Teheran. Qatar tidak memutuskan hubungan dengan Iran, tidak seperti Bahrain dan Sudan. Para pemrotes marah dengan eksekusi pemimpin Arab Saudi Syiah yang mendukung demonstrasi anti-pemerintah di Arab Saudi.
April 2017	Qatar membayar hampir \$ 1 miliar dalam kesepakatan sandera untuk menjamin pembebasan 26 anggota keluarga kerajaan Qatar yang diculik,

	selama misi perjalanan di Irak, oleh milisi Kata'ib Hezbollah yang didukung Iran.
8 Maret 2017	Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif bertemu dengan Qatar sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Teluk. Ini adalah pertemuan pertama sejak Qatar memanggil duta besarnya untuk Teheran pada Januari 2016
16 April 2017	Iran mengumumkan penyelesaian beberapa proyek pengembangan di ladang gas South Pars / North Dome setelah Qatar mencabut moratorium pengembangan timnya.
24 Mei 2017	Kantor Berita Qatar dilaporkan diretas ketika kantor berita memuat berita mengutip emir Qatar memuji Iran dan mengkritik Donald Trump. Pejabat Qatar mengecam itu sebagai berita bohong, tetapi cerita itu menjadi pemicu bagi Arab Saudi, UEA, dan lainnya untuk memblokir Qatar.
5 Juni 2017	Koalisi kuartet anti Qatar memutuskan hubungan dengan Qatar, mengutip dugaan kerjasamanya dengan Iran dan dukungan untuk terorisme di luar negeri. Krisis menghentikan pengiriman makanan dan perjalanan udara antara Qatar dan negara-negara kuartet tersebut.
11 Juni 2017	Iran mulai mengirim Qatar pasokan makanan besar-besaran dan menjanjikan 100 ton makanan setiap hari sampai krisis teratasi.
23 Juni 2017	Kuwait menyampaikan kepada Qatar 13 daftar 13 tuntutan dari kuartet anti Qatar, termasuk memutuskan hubungan dengan Iran.
25 Juni 2017	Dalam panggilan telepon antara para pemimpin negara, Iran dan Qatar berkomitmen untuk memperdalam kerja sama.
3 Juli 2017	Iran menandatangani kesepakatan gas besar dengan Total, pemasok gas komersial terbesar Inggris, dan China National Petroleum Corporation atas bagian ladang Pars Selatan di perbatasan dengan Qatar. Langkah itu ditafsirkan sebagai indikasi hubungan yang lebih hangat antara Doha dan Teheran.
18 Juli 2017	Koalisi pimpinan Saudi menjatuhkan daftar 13 tuntutan menjadi enam prinsip.
25 Juli 2017	Menteri Pertahanan Qatar berterima kasih kepada Iran karena telah membuka wilayah udaranya ke Qatar dan memasok makanan ke negara yang terkena sanksi pemblokiran tersebut.
23 Agustus 2017	Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan duta besarnya akan kembali ke Teheran untuk melanjutkan tugas diplomatiknya dan menyatakan minatnya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Iran.

31 Agustus 2017	Dr Hassan Rouhani, presiden Iran melakukan panggilan telepon kepada Emir Qatar yang menyatakan kesiapan Iran untuk mempererat hubungan dengan Qatar
-----------------	---

Sumber : Evan W. Burt, 2017. Qatar and Iran: Odd Bedfellows. Diakses melalui laman <https://iranprimer.usip.org/blog/2017/aug/02/Qatar-and-iran-odd-bedfellows>

Walaupun hubungan kedua negara tersebut mengalami gejala naik turun, tetapi Qatar dan Iran dengan baik dapat menjaga hubungan antar negaranya untuk tidak sampai ketitik konflik yang paling parah. Iran dan Qatar dianggap dapat menyatukan titik temu dari perbedaan preferensi strategi dan kebijakan dari kedua pemimpin. Menurut hasil analisis seorang Profesor dan Direktur Pusat Studi Internasional dan Regional di School of Foreign Service Universitas Georgetown di Qatar, Mehran Kamrava, dalam menjaga hubungan baik, Qatar dan Iran selalu memunculkan pendekatan “tanpa perselisihan” yang bersahabat secara luas oleh satu sama lain, meskipun ada situasi yang sangat sulit dan pilihan kebijakan yang sangat beragam (Kamrava, 2011). Qatar tidak pernah memandang Iran sebagai ancaman langsung untuk negaranya, oleh karena itu kedua negara ini selalu berhasil mempertahankan hubungan baik diantara mereka. Bahkan Qatar merupakan satu-satunya negara Teluk Sunni yang paling dekat dengan Iran. Pemerintah Qatar selalu berusaha untuk mengkonsolidasikan hubungannya dengan Teheran dan mendukung solusi damai untuk masalah politik yang melibatkan kedua negara. Hal tersebut disampaikan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim dalam perbincangannya dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2018).

Akselerasi dramatis dalam aliansi Qatar-Iran ini mulai berkembang sejak tahun 1979 setelah Revolusi Iran. Qatar dan Iran pertamakali menandatangani perjanjian tentang pengaturan hubungan diplomatik pada Oktober 1971, hanya satu bulan setelah Qatar memperoleh kemerdekaannya (Qatar Embassy in Tehran, 2017). Sejak saat itu, kedua negara mulai memiliki hubungan dekat karena keduanya adalah anggota OPEC, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Konferensi Islam. Walaupun begitu, sistem aliansi antara Qatar dan Iran menurut peneliti

adalah sepenuhnya informal. Dalam buku yang berjudul *International Relations : The Key Concepts* (2002) tulisan Martin Griffiths, seorang utusan Khusus PBB untuk Yaman dari Dewan Keamanan PBB dan Terry O'Callaghan, seorang dosen senior di Sekolah Komunikasi, Studi Internasional dan Bahasa (CIL) di *University of South Australia Magill Campus*, , menjelaskan bahwa aliansi informal sifatnya jauh lebih longgar, kurang stabil dan terkait keberkelanjutan kerjasama yang terjadi di antara mereka bergantung hanya kepada pihak yang terlibat (O'Callaghan, 2002). Selain itu, aliansi informal juga dapat berupa perjanjian rahasia antar para pemimpin (O'Callaghan, 2002). Seperti yang terjadi pada sistem aliansi Qatar-Iran , hubungan mereka tidak banyak ditandai dengan MoU atau perjanjian-perjanjian tertulis yang dipublikasikan. Karena sensitivitas GCC seputar kerja sama dengan Teheran, perjanjian-perjanjian yang dilakukan Qatar dengan Iran pada umumnya hanya simbolis. Mengingat Iran adalah agresor terbesar di wilayah Teluk Persia dan posisi Qatar yang sebelumnya ada dalam koalisi Teluk, Qatar akan sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Iran, terutama dimasa-masa krisis. Aliansi diantara kedua negara ini ada tetapi sedikit disamarkan untuk kepentingan keamanan kedua negara.

Hubungan Qatar dan Iran semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir dan mungkin akan terus mendekat di masa mendatang. Qatar nampaknya terus menentang tuduhan kuartet atas dukungannya terhadap organisasi terorisme Islam Sunni dan bertahan terhadap konsekuensi isolasi yang ditetapkan. Sanksi isolasi yang terus berlanjut mengakibatkan koneksi dengan Iran menjadi penting bagi Qatar. Dalam perjalanannya, seperti yang telah disajikan dalam tabel fluktuasi, hubungan antara Iran dan Qatar memiliki banyak sisi dan kontradiksi. Sifat dan tingkat hubungan diplomatik antara Iran dan Qatar telah bervariasi sejak berdirinya Republik Islam Iran pada tahun 1979. Adanya konsensus pandangan kebijakan negara-negara Teluk pada waktu itu, memaksa Doha mendukung Irak dalam perang Iran-Irak. Namun, Qatar hadir sebagai pihak penenang untuk menghindari konflik lebih dalam antar keduanya. Sampai setelah berakhirnya perang Iran-Irak, Doha menjalin hubungan bilateral penuh dengan Teheran. (Spyer, 2019)

Intensitas hubungan bilateral tersebut kembali menurun ketika Qatar bergabung ke dalam Dewan Keamanan Teluk atau GCC di tahun 1981, dimana anggota-anggota GCC memperdebatkan kedekatan Doha dengan Teheran sehingga saat itu Qatar menempatkan hubungan dengan sesama negara GCC menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada hubungannya dengan Iran. Selain itu, Qatar terkenal memiliki kebijakan luar negeri bercabang, seperti akhir-akhir ini Qatar berupaya untuk secara bersamaan mempertahankan hubungan hangat dengan barat atau *the west*, hubungan yang semakin mendalam dengan Iran, dan dukungan untuk kelompok politik Islam Sunni yang di cap sebagai organisasi terorisme oleh negara-negara Teluk yaitu Ikhwanul Muslimin, dimana gerakan-gerakan terkait Ikhwanul Muslimin digunakan untuk membangun pengaruh regional Qatar. Sikap diplomatis simultan Qatar tersebut berakibat pada beberapa hal. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin membuatnya jauh dari koalisi Teluk serta tidak menjadikannya cocok secara otomatis dengan Iran. Sedangkan Hubungannya dengan barat, tepatnya AS membuat hubungannya dengan Iran nampak tidak strategis. (Spyer, 2019)

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam sikap diplomatis Qatar tersebut. Bantuan keuangan dan dukungan media Aljazeera dari Qatar bagi kegiatan-kegiatan Hamaz dan Ikhwanul Muslimin pada momentum *Arab spring* kembali menghangatkan hubungan Qatar dan Iran. Dari sudut pandang Teheran, Qatar secara tidak langsung turut membantu keberhasilan Hamaz cabang Palestina dalam konfliknya dengan Israel di tahun 1990. Terlebih lagi, dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin juga dipandang telah membentuk blok saingan sendiri dalam regional Islam Sunni (Spyer, 2019). Mengenai intimidasi kuartet anti Qatar atas hubungannya dengan Iran yang notabene adalah pengikut Shi'a dan dikaitkan dengan organisasi militan sehingga koalisi memandang Iran sebagai ancaman. Namun pandangan itu tidak berlaku bagi Qatar. Tidak seperti beberapa negara GCC lainnya, Qatar hanya memiliki komunitas Syiah kecil, dengan Sunni menyumbang sekitar 90 persen dari populasinya. Karena alasan ini, Doha memandang upaya Teheran yang dituduhkan untuk menghasut perselisihan sektarian di wilayah Teluk sebagai ancaman yang lebih kecil daripada tindakan yang dilakukan sekutu-sekutunya di GCC 2017 silam. Oleh karena itu, Doha lebih memilih untuk memulihkan hubungan diplomatiknya

dengan Teheran. Karena upaya-upaya tersebut, Qatar sekali lagi berusaha untuk lebih dekat dengan Iran. (Baabood, n.d.)

Terlepas dari urusan politik, hubungan antara Qatar dan Iran juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Dua negara ini berbagi ladang gas terbesar di dunia. Pada tahun 1969, pada masa pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlavi, Iran dan Qatar menandatangani perjanjian demarkasi pada ladang gas seluas 9.700 km² yang membaginya dalam South Pars (3.700 km² untuk Iran) dan North Dome (6.000 km² untuk Qatar) di Teluk Persia (Made, 2017). Lapangan Kondensat Gas Pars Selatan / Kubah Utara diperkirakan memiliki sekitar 51 triliun meter kubik gas alam dan sekitar 50 miliar barel (7,9 miliar meter kubik) kondensat gas alam. Jika digabungkan, luas kedua ladang gas milik Qatar dan Iran tersebut dapat setara dengan akumulasi luas semua ladang gas alam di dunia.

Tetapi karena sanksi keuangan internasional terhadap Iran dan kelesuan ekonominya, Iran tertinggal dalam mengembangkan ladang gas tersebut di 67 tempat. Sebaliknya, Qatar mampu mengembangkan bagiannya di ladang gas tersebut dan menjadi negara terkaya di dunia dalam hal PDB perkapita. Untuk menghindari pertikaian diantara keduanya, Qatar mendeklarasikan moratorium pada 2005 tentang pengembangan North Dome. Qatar mengatakan bahwa moratorium tersebut ditetapkan untuk memberi waktu bagi Qatar dalam mempelajari dampak pada reservoir (tempat penyimpanan cadangan gas) akibat penumpukan hasil gas alam di North Dome (Finn, 2017). Moratorium tersebut jika dipelajari, secara tidak langsung telah memaksa Qatar untuk membatasi diri dalam melakukan eksploitasi hasil ladang gas karena dapat memperburuk hubungannya dengan Iran, mengingat ladang gas tersebut bukan hanya milik Qatar dan untuk memperkaya Qatar seorang diri. Oleh karena itu, dengan berbagi ladang gas dengan Iran maka muncul suatu keharusan bagi Qatar untuk membantu Teheran mengeksploitasi ladang gas bagiannya. Terutama sejak sanksi keuangan internasional yang dihadapi Iran secara bertahap dicabut pada tahun 2015, Qatar intens memberikan dukungan bagi berkembangnya ladang gas milik Iran, sehingga membantu Iran menjadi negara yang lebih kaya dari sebelumnya (Made, 2017).

Walaupun begitu, hubungan Qatar-Iran sempat menurun lagi di tahun selanjutnya, ketika Qatar masih aktif dalam koalisi Teluk, sebagai bagian dari

tindakan penyeimbangannya, Qatar berpartisipasi dalam kampanye koalisi yang dipimpin Saudi di Yaman antara tahun 2015 dan 2016. Pada Januari 2016, sebagai akibat dari serangan terhadap misi diplomatik Saudi di Iran oleh para pemrotes Iran, Qatar bersedia memanggil duta besarnya untuk Teheran dan mengecam serangan itu (Reuters, 2016). Meskipun demikian, tidak seperti negara-negara anggota GCC lainnya, terutama seperti Arab Saudi dan UEA, Qatar umumnya tidak mengkritik kegiatan-kegiatan “menyimpang” yang dilakukan Iran baik di dalam maupun luar negerinya. Qatar juga tidak pernah menganggap Iran sebagai ancaman ideologi maupun geopolitiknya (Baabood, n.d.). Qatar merasa harus menjaga hubungan baik dengan Iran dan mampu melakukannya karena tidak melihat Teheran sebagai ancaman keamanan di masa itu ataupun masa depan.

Dewasa ini, perlahan tapi pasti, Qatar bergerak lebih dekat ke arah aliansi dengan Iran. Krisis diplomatik Qatar belakangan ini menyebabkan konstelasi politik di Teluk Persia mengalami beberapa perubahan. Sistem aliansi Dewan Keamanan Teluk atau GCC juga telah terpecah dan melemah. Sejak kuartet anti Qatar melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar yang disertai dengan pemblokiran wilayah darat, udara, dan laut hubungan antara Qatar dan Iran menjadi semakin erat. Terhambat boikot perdagangan dan transportasi ditambah intimidasi atau *bully* yang ditimpakan kuartet anti Qatar memaksa Qatar untuk mencari bantuan dari negara lain dan membentuk sekutu baru, termasuk mengembalikan hubungan diplomatiknya secara penuh dengan Iran. Krisis diplomatik yang dihadapi oleh negara kecil namun sangat kaya ini banyak menarik simpatik dari negara lain, seperti Oman dan Turki yang pada masa krisis diplomatik tersebut juga dengan rela menjadi sekutu Qatar untuk melewati masa-masa sulitnya. Namun, hubungan politis yang baru terbentuk dan menjadi permasalahan besar di Teluk Persia adalah hubungan Qatar dengan Republik Islam Iran. Upaya Arab Saudi dan UEA membentuk kuartet anti-Qatar pada pertengahan 2017 untuk mengisolasi Qatar atas dukungannya terhadap radikalisme Islam dan hubungan hangatnya dengan Iran justru menghasilkan hubungan yang lebih dalam antara Qatar dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif dalam pidatonya di Paris mengatakan bahwa blokade tersebut hanya mendorong Doha ke kemitraan yang lebih dekat dengan Tehran, "*They accuse Qatar of being close to Iran but with their*

measure... they push Qatar towards Iran. They are giving Qatar like a gift to Iran," (Deutsche Welle, 2017).

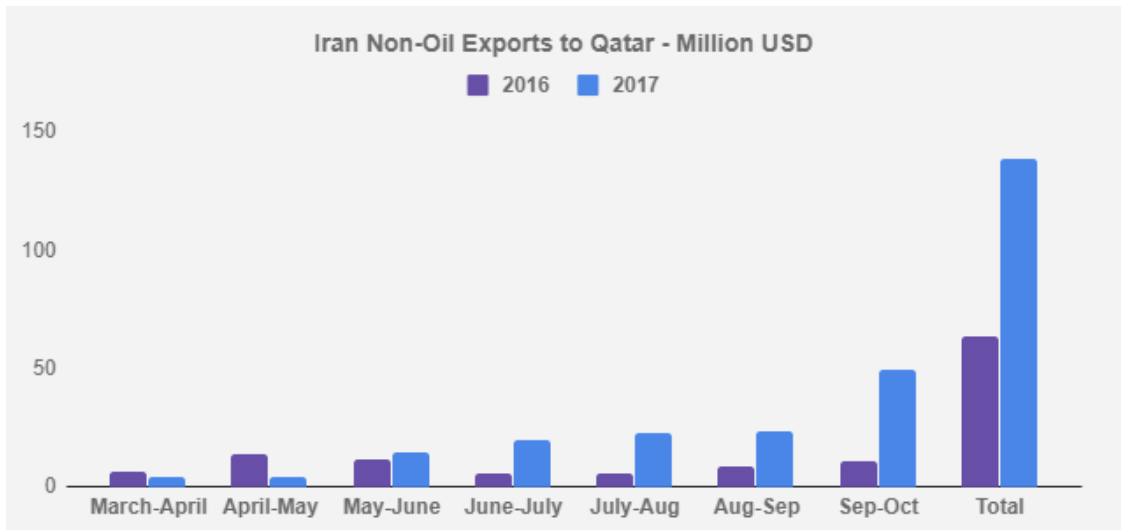
Krisis diplomatik Qatar tahun 2017 menjawab penguatan aliansi antara Qatar dan Iran. Qatar memandang hubungannya dengan Iran sebagai hal yang penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanannya. Namun kemitraan Qatar-Iran dalam bidang ekonomi tidak selalu dipandang baik, khususnya hubungan hangat kedua negara dalam berbagi ladang gas telah menciptakan inisiatif kuartet anti Qatar, terutama Arab Saudi dan UEA untuk mengisolasi Qatar. Blokade wilayah daratan, udara, dan laut serta embargo perdagangan mungkin menjadi keyakinan bagi kuartet anti Qatar untuk mengakhiri hubungan Qatar dan Iran. Namun faktanya upaya tersebut gagal, sebaliknya, pada bulan Agustus 2017 Qatar memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran disegala bidang. 23 Agustus 2017, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa duta besar Qatar kembali ke Teheran untuk melaksanakan tugas-tugas diplomatik. Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani bersama Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif juga membahas mengenai hubungan bilateral kedua negara dan cara-cara untuk mengembangkan hubungan bilateral Qatar-Iran itu sendiri.

Di sisi lain, perselisihan yang terjadi diantara negara-negara Teluk tersebut juga dapat meningkatkan pengaruh Iran. Teheran berusaha menggunakan krisis itu untuk memperdalam keretakan di antara negara-negara Teluk. Dalam krisis diplomatik Qatar tersebut Iran datang sebagai “pahlawan” bagi Qatar. Iran menjaga persediaan makanan Qatar dan menjadi pihak yang membantu menjaga ketahanan pangan Qatar untuk menghindari efek buruk dari isolasi. Kepala Pelabuhan Iran di Provinsi Boushehr, Mohammad Mehdi Bonchari mengatakan, tanggal 22 Juni 2017 Iran telah mengirim lebih dari 1.000 ton buah dan sayuran (Aljazeera, 2018), lalu Kepala Eksportir Ternak Iran, Mansour Pourian mengatakan, Iran telah mengirim 60 ton daging sapi. Kepala Humas Iran National Airline juga mengatakan, mengikuti sanksi di Qatar, IranAir juga mengangkut makanan dan sayuran ke Qatar dengan empat maskapai penerbangan. Iran juga siap memasok apapun yang dibutuhkan Qatar selama krisis, *“Dozens of Iranian businesses are ready to help Qatar with more goods if they are needed,”* ucap diplomat Iran di Doha (Reuters,

2017). Teheran juga memberikan dukungan untuk Doha dalam pembukaan *airspace*. 7 Juni 2017 menanggapi ketegangan antara negara-negara Teluk dan larangan penerbangan Qatar untuk menggunakan wilayah udara dari beberapa negara Teluk Persia, atas permintaan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Qatar, Iran mengeluarkan izin untuk Qatar menggunakan wilayah udaranya melalui Organisasi Penerbangan Sipil Republik Islam Iran (CAO.IRI), dengan demikian Qatar dapat memangkas kerugian akibat blokade Arab Saudi, UEA, dan Bahrain.

Qatar juga telah mengadakan beberapa pertemuan tingkat tinggi dengan para pejabat Iran untuk membahas perjanjian di berbagai bidang. Selain ikatan di bidang minyak dan gas alam, Iran dan Qatar juga bekerja sama di sektor pengiriman dan perdagangan. Pada Juli 2017, Kepala Organisasi Pengembangan Perdagangan Iran, Waliollah Afkhami-Rad berkunjung ke Doha guna menandatangani perjanjian perdagangan. Dua minggu setelahnya tepatnya pada 12 Agustus 2017, Iran dan Qatar melakukan pertemuan di Doha guna membahas mengenai peningkatan kerjasama ekonomi antara Qatar dan Iran. Direktur Jenderal Ekspor dan Kerjasama Pertanian Organisasi untuk Pengembangan Perdagangan di Iran (OEDI), Mahmoud Bazari mengatakan bahwa Qatar tertarik untuk membeli produk-produk Iran dan mengadakan negosiasi dan perjanjian untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Iran dan Qatar. Pejabat tinggi kedua negara berhasil menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian (The Islamic Republic News Agency, 2017).

Gambar 3. 5 Gambar Diagram Data IRICA menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam nilai ekspor non-minyak Iran ke Qatar selama empat bulan pertama setelah keretakan Arab.



Sumber : financialtribune.com

Data dari Administrasi Pabean Iran menunjukkan perbandingan tingkat ekspor Iran-Qatar dalam kerangka waktu yang mencakup periode sebelum dan sesudah boikot, bahwa Iran mengekspor \$ 139 juta barang non-minyak ke Qatar selama tujuh bulan hingga 22 Oktober 2017 dan mencatat kenaikan yang sangat tajam yaitu setinggi 117,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Iran mengekspor sekitar \$ 50 juta produk non-minyak ke Qatar selama periode satu bulan, yang menunjukkan kenaikan lima kali lipat dari tahun ke tahun dan menandakan pertumbuhan perdagangan mereka semakin cepat. Menurut harian bisnis Iran, Financial Tribune, produk yang menyumbang porsi terbesar dalam ekspor adalah bitumen, makanan, dan produk pertanian. (Arefmanesh, 2017)

Sebagai kelanjutan dari perjanjian di atas, 26 November 2017 Qatar dan Tehran menunjukkan tanda terbaru dari tumbuhnya hubungan dekat di antara keduanya, ketika Menteri Ekonomi Qatar Sheikh Ahmed bin Jassim Al-Thani melakukan kunjungan balasan ke Tehran, ibukota Iran membicarakan hubungan bisnis antar kedua negara dengan Menteri Perindustrian, Tambang dan Perdagangan Mohammad Shariatmadari dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Setelah perundingan, Shariatmadari mengatakan perdagangan antara kedua negara

saat ini bernilai sekitar \$ 1 miliar per tahun, tetapi mencatat bahwa Qatar ingin meningkatkan lima kali lipat menjadi \$ 5 miliar per tahun. Hasilnya, terhitung dalam satu tahun pertama setelah krisis diplomatik Qatar, angka perdagangan bilateral Qatar-Iran naik 2,5% dengan total perdagangan mencapai \$250 juta (sampai 20 Maret 2018). Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Qatar, Mohammed bin Ahmed bin Towar dengan anggota delegasi perdagangan Iran yang berkunjung ke Doha selama dilaksanakannya *International Agriculture Exhibition* atau yang dikenal dengan Agrite2018 (Financial Tribune, 2018). Kegiatan ekonomi keduanya telah tumbuh dengan tajam tahun tersebut dan tentunya ada lebih banyak potensi untuk semakin berkembang.

Selain mengekspor produknya sendiri ke Qatar, Iran juga sekarang bertindak sebagai jalur perdagangan penting untuk barang-barang yang berasal dari negara lain seperti Turki dan Azerbaijan. Untuk meningkatkan proses itu, Qatar, Turki dan Iran menandatangani perjanjian (MoU) perdagangan tiga arah di Teheran pada November 2017 yang bertujuan untuk memudahkan barang bergerak antara ketiga negara (Dudley, 2017). Iran mengakomodir perjanjian tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Qatar karena Qatar terisolasi dari tetangganya di Semenanjung Arab, sehingga perjanjian tersebut ditujukan untuk mempercepat masuknya pasokan kebutuhan domestik Qatar yang terhambat akibat blokade kuartet anti-Qatar.

Sebelum krisis, Qatar mengimpor sebagian besar peralatan konstruksinya dari Arab Saudi, melintasi satu-satunya perbatasan darat yang dimiliki Doha. Namun, dengan adanya blokade, rute pasokan tersebut sekarang terputus, Qatar terpaksa mencari rute lain untuk ditempuh. Sebuah pelabuhan raksasa yang terletak 40 kilometer dari Selatan Doha, Pelabuhan Hamad menjadi jalur baru untuk menerima sejumlah besar bahan makanan dan bahan bangunan untuk proyek-proyek konstruksi termasuk stadion untuk Piala Dunia sepak bola 2022. Iran menjadi salah satu negara yang menawarkan bahan baku dan ahli konstruksi untuk memenuhi kebutuhan bagi terwujudnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2022.

Hubungan Qatar dan Iran semakin meningkat sepanjang waktu. Satu tahun setelah krisis diplomatik, Qatar banyak melakukan perluasan kerjasama dengan Iran, menandatangani beberapa nota kesepahaman di berbagai bidang. Seperti pada April 2018, Perusahaan TIPAX Iran dan Perusahaan Qatar Pos menandatangani MoU untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama bilateral. Nota Kesepahaman ditandatangani antara Dr. Mehrdad Fakher, Kepala Eksekutif Perusahaan TIPAX dan Faleh Mohammad al-Naimi CEO dari Qatar Post Company untuk memfasilitasi pertukaran kiriman pos antara Iran dan Qatar, untuk membuka langkah yang tepat dalam pengembangan perdagangan elektronik atau dikenal E-Commerce, serta untuk bekerjasama dalam bidang impor dan ekspor melalui rute laut dan udara (Iran Daily, 2018).

Peningkatan hubungan bilateral Qatar-Iran di segala bidang juga secara resmi ditandai dengan diterimanya kembali Duta Besar Qatar untuk Iran. Pada 16 Oktober 2018 pukul 12.02, Duta besar Qatar untuk Iran yang baru tiba di Tehran untuk menjalankan tugas diplomatiknya kembali di Iran disambut secara resmi oleh Presiden Hassan Rouhani (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2018). Dr. Hassan Rouhani menerima kredensial HE Mohammed bin Hamad Al Hajri sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Qatar untuk Republik Islam Iran. Presiden Rouhani menyampaikan harapannya kepada Duta Besar Qatar untuk Iran supaya berhasil dalam tugasnya untuk lebih meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Negara Qatar dan Republik Islam Iran (Qatar Embassy in Tehran - Islamic Republic of Iran, 2018).

Penguatan hubungan kedua negara tersebut tidak semata untuk menguntungkan Qatar saja, Iran juga mendapat berbagai keuntungan dalam hubungan ini. Dari pengalihan rute penerbangan Qatar Airways, yang tidak lagi dapat terbang melalui wilayah udara Bahrain, Arab Saudi atau UEA sehingga Qatar harus menempuh jalan yang lebih panjang untuk sampai ke Amerika dan bagian-bagian Eropa serta Afrika dan Iran dengan senang hati menawarkan wilayah udara untuk memotong rute tersebut, tentu Iran mendapatkan biaya penerbangan yang tinggi dalam proses tersebut. Ada juga potensi pertumbuhan arus investasi di kedua arah. Dari sudut pandang Iran, jika dapat menarik investasi Qatar, hal tersebut akan

membantu meningkatkan ekonominya yang telah berjuang untuk memenuhi sanksi keuangan akibat kesepakatan nuklir JCPOA 2015. Satu ide menarik lainnya, yaitu mengenai daftar ganda utang Iran. Iran sedang menjajaki opsi untuk mencari daftar tagihan keuangan Islam (ITB) dan obligasi negara di Bursa Efek Qatar (QSE), menandakan penguatan hubungan ekonomi antara Teheran dan Doha. Neda Bashiri, manajer pengembangan produk Iran Fara Bourse melakukan perjalanan ke Qatar untuk mengajukan beberapa tawaran kepada QSE mengenai daftar ganda ITB Iran. Bashari mengatakan bahwa mereka masih dalam tahap awal pembicaraan, dan jika mendapat respon positif dari Qatar maka pihaknya siap untuk memulai negosiasi tingkat tinggi. (Perumal, 2017)

Nampaknya aliansi Qatar-Iran terbentuk dengan sangat hati-hati. Karena sensitifitas mayoritas negara-negara Teluk Persia seputar Iran ditambah posisi Qatar yang juga dekat dengan Amerika. Walaupun jika dilihat dari penjelasan di atas, hubungan antara Qatar dan Iran dapat dikatakan beraliansi atau saling bersekutu. Karena pada hakekatnya aliansi merupakan kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk bekerja sama dalam masalah keamanan secara timbal balik. Negara-negara masuk ke dalam pengaturan keamanan melalui kerja sama dengan tujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang berlaku. Dengan mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki dan bertindak bersama-sama, mitra aliansi percaya bahwa mereka dapat meningkatkan posisi kekuasaan mereka secara keseluruhan dalam sistem internasional dan mewujudkan keamanan relatif terhadap negara-negara di luar aliansi. (O'Callaghan, 2002). Namun tetap saja hubungan antara Qatar-Iran ini sebenarnya tidak mudah, mengingat Qatar adalah tuan rumah bagi pangkalan udara AS terbesar di Timur Tengah, pangkalan al-Udeid, rumah bagi 10.000 personel militer Amerika Serikat. Disisi lain Qatar juga memiliki perjanjian keamanan dengan Iran.

Qatar dan Iran pernah menandatangani pakta keamanan bersama di tahun 2010. Kantor Berita Resmi Fars Iran menyebut perjanjian itu sebagai "pakta pertahanan" yang mencakup "pertukaran pakar teknis dan perluasan kerja sama dalam pelatihan dan kampanye melawan terorisme." (voanews, 2010). Pakta tersebut kemudian dikembangkan akhir-akhir ini, tepatnya pada 4 Maret 2019 para

pejabat militer Iran dan Qatar bertemu di Doha untuk membahas status terbaru dari hubungan bilateral serta cara-cara untuk memperluas hubungan militer antara kedua negara (MEHR News Agency, 2019). Pertemuan tersebut disinyalir menjadi kelanjutan dari perjanjian pertahanan antara Qatar dan Iran tahun pada tanggal 24 Februari 2010 silam yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Iran saat itu Ahmad Vahidi dan Kepala Staf Militer Qatar saat itu Hamad bin Ali Al Attiyah. Perjanjian pertahanan antara Qatar dan Iran tersebut mencakup beberapa hal, antara lain : **(Al Meezan Qatar Legal Portal, 2013)**.

- 1) Perjanjian Pertahanan bersama tersebut dibentuk guna membangun hubungan bersahabat diantara Qatar dan Iran.
- 2) Perjanjian Pertahanan tersebut menandakan bahwa Qatar dan Iran berbagi hubungan yang saling menguntungkan di semua bidang, terutama dalam masalah-masalah pertahanan regional yang penting.
- 3) Perjanjian Pertahanan bersama tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kerjasama bilateral dan internasional di bidang keamanan.
- 4) Perjanjian Pertahanan bersama tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dalam hal memastikan keamanan nasional kedua negara serta kesejahteraan dan kemakmuran kedua bangsa.
- 5) selain itu, Perjanjian Pertahanan bersama tersebut juga digunakan kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir, seperti terorisme dan penyelundupan narkoba, zat-zat psikotropika, dan zat kimia berbahaya sesuai yang tercantum dalam Konvensi Obat-Obatan Narkotika (1961), Konvensi Zat Psikotropika (1971) dan Konvensi PBB tentang Lalu Lintas Gelap dalam Obat Narkotika dan Zat Psikotropika.
- 6) Menurut Iran, Pakta Pertahanan tersebut juga mencakup pertukaran pakar teknis dan perluasan kerjasama dalam pelatihan dan kampanye melawan terorisme.

- 7) Perjanjian Pertahanan bersama antara Qatar dan Iran juga melambangkan niat Iran untuk membangun citra Iran sebagai negara damai sehingga dapat meningkatkan peran Iran di kawasan Teluk.

Perjanjian Pertahanan bersama antara Qatar dan Iran tersebut cukup menggambarkan bahwa mereka membutuhkan hubungan yang kuat satu sama lain. Menurut Alex Vatanka dari Janes Defense Analyst mengatakan salah satu tujuan penting Teheran melakukan kerjasama pertahanan dengan Qatar tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang bersahabat dan tidak memiliki niat buruk terhadap negara-negara Arab, hal ini didasari dengan harapan Iran dapat meningkatkan perannya di kawasan Teluk Arab. Sedangkan bagi Qatar, kerjasama pertahanan dengan Iran adalah hal yang penting untuk mengantisipasi ancaman dari Arab Saudi. Mengingat, Qatar selalu memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi, sehingga memiliki hubungan yang baik dengan Qatar adalah strategi yang masuk akal untuk menjaga stabilitas keamanannya. Dengan jejak sejarah seperti itu, maka Qatar dan Iran butuh menjaslin hubungan yang baik dan menguntungkan satu sama lain. Hal ini juga yang mendasari loyalitas dalam hubungan antar keduanya (Voice of America, 2010).

Salah satu hal yang dapat menunjukkan hubungan yang setia Qatar untuk Iran adalah ketika Qatar menempatkan diri di antara Amerika dan Iran. Qatar telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil bagian dalam sanksi atau upaya militer apapun terhadap Iran. Menteri Pertahanan Qatar Khalid al Attiyah pada Juni 2018 menyatakan keberatan Qatar terhadap kampanye melawan Iran dengan pernyataan: "Banyak perbedaan" dengan Iran tetapi itu tidak berarti "kita pergi dan mengobarkan perang" di wilayah tersebut. Attiyah juga menambahkan seruan seperti : apakah bijaksana untuk mengundang Amerika Serikat dan mengundang Israel untuk memerangi Iran? Apakah ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendorong kawasan itu atau suatu negara di kawasan itu untuk memulai perang di Iran, hal tersebut tentu akan sangat membahayakan keamanan kawasan. Oleh karena itu, daripada menginisiasi perang, Attiyah menghimbau lebih baik mengundang Iran untuk berdialog, *"Iran is next door. We should call Iran, put all the files on the table and start to discuss to bring peace rather than war,"* (Haaretz, 2018).

Bahkan akhir-akhir ini ketika terjadi ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, dimana AS mengerahkan kapal perang induk di Teluk dan B-52 Bombers di lapangan udara Al-Udeid Qatar, Sheikh Tamim tetap tidak mau terlibat segala upaya militer untuk menyerang Iran. Dalam percakapan telepon antara Presiden Rouhani dan Sheikh Tamim pada 6 Mei 2019 lalu, Sheikh Tamim memberi pernyataan kepada Presiden Rouhani bahwa pihak Qatar telah mengatakan berkali-kali kepada Amerika dan relasi-relasinya bahwa perbedaan pendapat ini perlu diselesaikan melalui diskusi dan bahwa Qatar sangat menentang tindakan apa pun yang menyebabkan kegelisahan di wilayah mereka (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran, 2019). Qatar lebih memilih bergerak untuk meredakan ketegangan Iran-AS di Teluk. Menteri Luar Negeri Qatar mengunjungi Iran untuk membantu mencegah krisis yang semakin dalam antara AS, Iran dan kekuatan-kekuatan regional lainnya. Tujuan dari kunjungan itu adalah untuk membuka jalan baru untuk menyelesaikan krisis yang berkembang antara Iran dan Amerika Serikat dan meredakan situasi yang bergejolak (Aljazeera, 2019). Dalam kasus ini Qatar hanya ingin berperan sebagai mediator bukan sebagai koalisi yang memusuhi Iran. Pemerintah Qatar menghargai Iran dan sikapnya, dan tidak akan pernah melupakan kebaikan Teheran terhadap mereka selama masa-masa sulit.

Kecondongan Sheikh Tamim ke Iran kembali kepada era ayahnya Sheikh Hamad. Seperti Sheikh Hamad, Sheikh Tamim juga percaya Iran adalah mitra yang penting bagi Qatar di Timur Tengah. Seperti Sheikh Hamad, Sheikh Tamim tidak tertarik dengan koalisi Arab Saudi, tidak senang dengan dominasi yang mengekang negaranya untuk maju dan mandiri. Tuntutan dan syarat-syarat dari kuartet anti Qatar yang dipenuhi dengan tuduhan kompleks menimbulkan keengganan Doha untuk kembali tunduk dengan mereka. Sampai pada saatnya, Iran telah membuktikan dalam tindakan bahwa Iran akan berdiri bersama Qatar di masa-masa sulit dan Iran siap untuk melanjutkan kerja sama dengan Qatar, negara yang telah dianggap mengikat persaudaraan yang bersahabat (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran, 2019). Hasilnya, Qatar dan Iran mengikat persaudaraan, berkembang untuk memberi manfaat bagi kedua negara.

Terlebih, jika dilihat, strategi regional Qatar didasarkan pada fondasi yang genting dan kontradiktif. Emir Qatar masih menekan aktivitas Islam di dalam wilayahnya sendiri, sementara bermitra dengan afiliasi Islam di tempat lain bukan karena berdasarkan afiliasi yang mendalam atau murni, tetapi untuk meningkatkan pengaruh regional Qatar. Masih dengan ambisi yang sama, Sheikh Tamim akan terus membawa Qatar menjadi negara yang independen dan paling berpengaruh di Regional. Dan dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar ini, Iran merupakan koalisi dirasa mampu menambah kekuatannya di Regional, baik di bidang ekonomi, keamanan, maupun bidang lainnya. Munculnya sistem aliansi informal ini secara tidak langsung telah mengadu kekuatan kuartet anti-Qatar di Teluk Persia dengan Rouhani dan Tamim di sisi lain.

Terlepas dari kontadiksi yang terkandung dalam hubungan Qatar dan Iran. Setidaknya Qatar dapat menjadi contoh bagi negara-negara di Timur Tengah untuk melaksanakan kebijakan yang moderat dan rasional dalam hubungan internasional. Penyelesaian masalah melalui langkah diplomatik lebih menguntungkan daripada melalui langkah konvensional seperti perang. Qatar juga mampu membuktikan bahwa negara yang dianggap paling mengancam dapat ditaklukan dan dijadikan saudara dengan pendekatan tanpa perselisihan. Dengan pendekatan tersebut, bahkan Qatar dapat mengembangkan kerjasama dengan Iran di bidang politik dan ekonomi dengan Iran tanpa halangan. Dengan adanya krisis diplomatik yang mendekatkan hubungan Qatar dan Iran justru memberi kesempatan untuk kedua negara ini menjadi aktor yang berpengaruh dalam stabilitas kawasan.

3.2 Analisis Faktor-Faktor Pendorong Penguatan Aliansi Qatar-Iran dalam Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 Melalui Konsep *Bandwagoning*

Setelah memaparkan mengenai *balance of power* dan pola aliansi yang diterapkan oleh Qatar dan Iran, maka dalam bagian ini tiba saatnya bagi peneliti untuk menganalisis studi kasus penelitian ini ke dalam konsep utama yang dipilih yaitu *bandwagoning*. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa *bandwagoning* sebagai bentuk *balance of power* yang dilakukan Qatar untuk menghadapi tekanan Kuartet anti Qatar. Menurut Schroeder (dikutip dalam Elman, 1995), aktor negara memiliki reaksi terhadap situasi strategis mereka, negara dapat

menanggapi niat dan kemampuan dari negara-negara lain, memilih strategi yang konsisten dan sesuai dengan posisi mereka dalam struktur kekuasaan global, dan mengejar kebijakan yang mungkin memberikan mereka keuntungan yang lebih besar daripada yang merugikan. Dengan kata lain, konsep *bandwagoning* juga menyatakan bahwa menyelaraskan dengan koalisi yang tepat maka negara akan mudah mencapai pertahanan keamanan yang kuat.

Keadaan tersebut kemudian membawa hasil bahwa *Bandwagoning* adalah langkah yang tepat bagi Qatar dalam menghadapi masa krisisnya. Sesuai dengan apa yang dicetuskan oleh Waltz mengenai perilaku aliansi internasional dalam *theory of International Politics*, perilaku *bandwagon* dapat menyatukan dua sisi *irreversibility* atau ketakterbalikan yang di satu sisi melemahkan dan menstimulasi di sisi lainnya. Dalam politik internasional, aliansi bergerak pada keberuntungan sehingga ketika negara dapat memetik manfaat dari aliansi tersebut maka negara akan mengakselerasikan gerakannya. Qatar sebagai negara yang lemah, terasingkan, dan seketika terpuruk pada Juni 2017 tersebut memutar kebijakan luar negerinya dengan mengakselerasikan hubungan diplomatiknya dengan Iran, negara yang diasingkan di teluk Arab tapi mampu menarik perhatian musuh-musuhnya. Serta dapat menjadi suatu hubungan yang dapat menaikkan tingkat kekhawatiran kuartet terhadap ancaman Iran dan mencegah kuartet untuk menyerang atau memberlakukan sanksi lebih lanjut.

Ketika negara kecil seperti Qatar telah masuk ke dalam kategori negara yang terancam, *smallness* sangat membebani pilihan kebijakan pertahanannya. Hal tersebut kemudian menjelaskan kecenderungan negara-negara kecil dalam merumuskan kebijakan keamanannya melalui strategi *balancing* atau *bandwagoning*. Dua strategi tersebut adalah bagian dari teori *balance of power* Walt, seperti yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, *Balance of power* menekankan pada efektivitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara dengan melihat kekuatan yang merujuk pada kemampuan atau kapabilitas negara pesaing ataupun aliansi yang ada. Qatar sebagai negara yang terancam membentuk aliansi baru untuk menyeimbangkan kekuatan kuartet anti Qatar yang mengintimidasi negaranya, hal ini muncul karena ada keadaan dimana negara yang terancam tersebut akan mengusahakan keseimbangan

kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah Qatar bereaksi untuk mencari negara lain dan dijadikan aliansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Qatar untuk bertahan dan menghadapi agresornya. Dalam hal ini, Iran adalah negara yang dituju Qatar untuk menjadi penambah *power* dalam menghadapi krisis diplomatik tahun 2017 tersebut. Qatar melakukannya karena struktur sistem internasional membuat negaranya tidak punya banyak pilihan untuk bertahan hidup atau *survive*.

Selain alasan *smallness* digunakan untuk menggambarkan kecenderungan menggunakan strategi *balancing* atau *bandwagoning*, jenis ancaman juga menentukan hal tersebut. Dalam realisme tradisional memang BoP ditekankan pada persaingan pertahanan dalam bidang militer saja, artinya setiap peningkatan kapabilitas atau kemampuan militer negara akan ditanggapi dengan persaingan dari negara lain karena dianggap menimbulkan ancaman. Namun, seiring berkembangnya waktu, ancaman yang dihadapi negara semakin beragam, tidak hanya mengenai kapabilitas militer saja ancaman juga dapat merujuk pada bidang-bidang politik, ekonomi, budaya atau yang lainnya. Beragamnya ancaman membuat negara merespon dengan melakukan aliansi atau bersekutu terutama dengan negara yang dianggap paling mengancam melalui strategi *balancing* atau *bandwagoning*.

Sentimental kuartet anti Qatar nyatanya lebih kompleks dan menempatkan Qatar ke dalam posisi terintimidasi. Peran kunci dari negara-negara kecil yang menyadari bahwa mereka berada dalam konsisi kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk mempengaruhi sistem internasional, cenderung akan melakukan *bandwagoning* daripada memaksakan negaranya untuk menyeimbangi posisi negara-negara kuat hanya karena ingin memperoleh keuntungan (Waltz, 1979). Mengacu pada gagasan *bandwagoning* dalam konteks negara-negara kecil, mereka menunjukkan bahwa banyak negara-negara kecil yang bersedia untuk mengejar “strategi akomodasi” dengan negara-negara besar. Langkah Qatar melakukan kesepakatan kerjasama dan memulihkan hubungan diplomatik dengan negara yang relatif kuat, Iran, apakah mencerminkan strategi *bandwagoning*? Dalam hal ini, menyelaraskan dengan Iran yang dianggap sebagai kekuatan revolusionis di Arab, berperan sebagai musuh Arab, dan dalang ekstrimis di Timur Tengah menjelaskan

kerentanan Qatar dalam sistem internasional sebagai negara yang sedang lemah (tidak mampu menjamin keamanan sendiri) :

“Iranian Foreign Minister, Javad Zarif made the remarks in a meeting with Former UN Secretary-General Kofi Annan held on the sidelines of the Oslo Forum on Tuesday. He pointed to the pressures imposed on Qatar by Saudi Arabia, saying that Iran is to provide required aids for Qatari people. Annan also addressed the meeting, noting that in case of deterioration of the regional condition all countries will be losers.” (IRNA, 2014)

“Qatar’s Foreign Ministry said its ambassador would return to Tehran to resume his diplomatic duties and expressed interest in strengthening bilateral relations. Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, and the United Arab Emirates in June launched an economic and travel embargo against Qatar over its close ties to Iran. “ (Ohikere, 2017)

Strategi ini membantu Qatar untuk bersekutu dengan negara yang sampai sekarang masih menjadi kekuatan revisionis, daripada jatuh ke tangan negara-negara besar yang tergabung dalam koalisi kuartet anti Qatar. Alasan mengapa Qatar mengadopsi strategi ini karena bandwagon merupakan kekuatan yang paling mengancam kekuatan musuh. Ini adalah situasi di mana keterlibatan Qatar dengan Iran menciptakan gagasan bahwa negara-negara, khususnya negara-negara yang lebih lemah memilih strategi bersekutu dengan kekuatan besar daripada harus menyeimbangi kekuatan agresor. Dengan demikian, langkah Qatar cukup untuk menjelaskan perilaku *bandwagoning*.

Cara Qatar menangani ancaman eksternal mencerminkan kemampuannya untuk bereaksi secara strategis terhadap kondisi eksternal. Perannya dapat tercermin melalui penjelasan Walt (1978) bahwa *Bandwagon* sendiri merupakan suatu upaya negara yang memiliki *power* yang lebih kecil untuk bergabung dan mengikuti negara yang memiliki *power* lebih besar untuk mendapatkan tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya. Hal Ini menunjukkan bahwa dengan melakukan *bandwagon* kepada Iran , Qatar akan mendapatkan tambahan *power* untuk menghadapi dan melawan tekanan kuartet. Dari penjelasan tersebut maka muncul faktor-faktor yang mendorong atau memicu penguatan aliansi Qatar-Iran dalam kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017. Meskipun pada bagian sebelumnya telah banyak disinggung mengenai alasan-alasan hubungan kuat Qatar-Iran, pada bagian

ini peneliti secara lebih dalam akan menjelaskan faktor-faktor yang menurut peneliti paling utama, diantaranya :

3.2.1 Faktor Keamanan

Keamanan menjadi faktor pertama yang muncul dalam langkah Qatar melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memperkuat interaksi diantara keduanya. Jika melihat dampak dari krisis diplomatik Qatar, keamanan tentu saja menjadi aspek yang pertama kali disasar. Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan secara tiba-tiba oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir beserta sanksi pemblokiran kepada Qatar secara drastis mengubah kehidupan negara kecil yang kaya tersebut. Krisis diplomatik menyebabkan Qatar terisolasi dan mengalami kesuraman dalam hubungan antarnegara dan antarbangsa di wilayah Teluk Persia.

Walaupun begitu Qatar telah menolak 13 tuntutan yang berubah menjadi enam prinsip yang telah diberikan oleh kuartet anti Qatar sebagai syarat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik mereka. Penolakan Qatar tersebut dilakukan karena dengan adanya syarat-syarat tersebut, kedaulatan dan hak-hak Qatar sebagai negara yang merdeka telah dilanggar. Syarat-syarat yang diberikan kuartet juga dirasa Qatar terlalu rumit, dan membawa kerugian yang lebih besar untuk Qatar. Disisi lain, penolakan Qatar untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kuartet tersebut mengantarkan krisis Qatar ke penyelesaian yang buntu. Oleh karena itu, krisis memaksa Qatar untuk memutar arah kebijakan luar negerinya dan mencari bantuan untuk mempertahankan keamanan domestik Qatar. Sebagai hasilnya, krisis jugalah yang mengantarkan Qatar untuk kembali memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran dihitung lebih menguntungkan bagi Qatar daripada harus menuruti tuntutan kuartet. Iran dalam hal ini menyambut keputusan dari Doha tersebut dengan mengirimkan pasokan makanan yang dibutuhkan selama krisis masih berjalan dan membuka ruang udaranya untuk penerbangan Qatar. Dalam hal ini, Iran hadir sebagai pihak yang membantu Qatar untuk mengamankan kebutuhan pangan yang krusial dan

membantu memulihkan perekonomian Qatar yang banyak terkuras untuk biaya perubahan rute penerbangan selama blokade berjalan, pembukaan ruang udara Iran untuk Qatar juga memberi sedikit kemudahan untuk akses penerbangan dan untuk kegiatan mobilitas udara Qatar.

Gambar 3. 6 Pesawat Iran yang berisi pasokan makanan mendarat di Doha



Sumber : www.cnn.com

Selain itu, beraliansi dengan Iran juga dapat merubah pola aliansi di Teluk Persia, hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terburuk yaitu terjadinya kesenjangan blok sunni di Teluk, karena Qatar harus melakukan manuver dari aliansi lamanya yang pro Arab Saudi menjadi condong ke Iran. Qatar memang harus sangat berhati-hati dalam mengatur hubungannya dengan Iran. Tetapi disini lain, dalam upaya untuk melawan tekanan kuartet anti Qatar, aliansi antara Qatar dan Iran dapat meningkatkan pengaruh Qatar di Timur Tengah. Seperti ambisi Qatar yang sudah dijelaskan sebelumnya, Qatar menunjukkan keinginannya untuk menjadi negara yang berpengaruh di regional melalui keikutsertaanya dalam

konflik-konflik regional seperti yang paling populer adalah peran Qatar dalam konflik Suriah, Libya, dan Mesir. Dengan beraliansi dengan Iran, Qatar dapat bebas dari intervensi dan kontrol Arab Saudi untuk berpolitik. Selama tergabung dalam aliansi Teluk, tindak tanduk Qatar di Timur Tengah selalu diawasi dan dibatasi, keikutsertaan Qatar dalam suatu permasalahan di regional selalu berakhir menjadi tuduhan intervensi negara lain. Sebenarnya kontrol terhadap Qatar tersebut dilakukan karena Arab Saudi dan koalisinya merasa iri dan tersinggung karena Qatar selalu berhasil memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa regional. Oleh karena itu, dengan beraliansi dengan Iran Qatar dapat menunjukkan bahwa ia mampu mewujudkan kebijakan luar negerinya yang independen.

Qatar adalah negara yang tidak memiliki pertahanan militer yang kuat. Putusnya hubungan diplomatik Qatar dengan kuartet juga menyebabkan Qatar tidak memiliki perlindungan militer. Tetapi dengan dipulihkannya hubungan bilateral Qatar-Iran disemua bidang maka perjanjian keamanan dan kerjasama antara Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps Navy (IRGC-N) dengan Qatar Navy kembali berlanjut, sehingga kekuatan militer Qatar juga dapat meningkat, kekuatan militer Iran tidak dapat diragukan. Sebagai kekuatan revisionis, sejak lama AS dan sekutunya telah melihat Iran sebagai kekuatan yang tidak stabil di Timur Tengah. Kemampuan Iran untuk mengembangkan program nuklirnya sendiri juga banyak menyedot perhatian internasional. Setidaknya dengan pulihnya hubungan Qatar-Iran dapat menaikkan kekhawatiran kuartet terutama Arab Saudi, karena ancaman terbesar mereka telah ikut memainkan peran dalam kerusuhan regionalnya sendiri.

Qatar dan Iran juga memiliki kerjasama di bidang keamanan, keduanya menandatangani pakta keamanan dan perluasan kerjasama di bidang pertahanan untuk melawan terorisme. Hal tersebut juga dapat membantu Qatar untuk mematahkan tuduhan-tuduhan kuartet mengenai keberpihakannya terhadap organisasi terorisme dan memulihkan kepercayaan negara-negara lain atas negaranya. Qatar mempercayakan hal tersebut kepada Iran karena sejak Mayjen Qassem Soleimane menjadi komandan pertahanan Iran, Teheran muncul sebagai kekuatan dominan dalam postur keamanan. Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Soleimani menerima penghargaan karena sukses

memimpin agenda perang melawan terorisme dan ekstrimis di wilayahnya dan menekankan bahwa pencapaian Soleimani telah menyiapkan alasan untuk menciptakan wilayah yang kuat dan stabil yang bebas dari kekerasan dan radikalisasi (Bodansky, 2019).

3.2.1 Faktor Inefisiensi GCC (Gulf Cooperation Council)

“GCC had “no teeth” to resolve any dispute. They have mechanisms in place and never trigger them because some countries believe they are non-binding.”

-Foreign Minister of Qatar,

-Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani-

Berdasarkan hasil analisis, faktor inefisiensi dari *Gulf Cooperation Country* (GCC) atau Organisasi Dewan Keamanan Teluk menjadi sorotan tersendiri bagi Qatar. Menurut Qatar organisasi ini tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung gagal untuk menyelesaikan perselisihan antar anggotanya secara adil. Gagalnya GCC dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar, memaksa Qatar untuk mencari aliansi lain. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani mengatakan bahwa Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan sekretaris jendralnya sekarang tidak berdaya. Sheikh Mohammed juga menambahkan bahwa aliansi regional tersebut telah dirusak oleh krisis Teluk. Pihak Qatar juga menyatakan bahwa aliansi dalam GCC perlu dibentuk kembali dan dirancang ulang untuk memastikan stabilitas keamanan kawasan di masa depan.

Qatar menyebutkan bahwa GCC seperti organisasi yang tidak memiliki gigi atau yang berarti rentan. GCC memang memiliki mekanisme tetapi tidak memiliki ikatan hukum yang kuat dan tegas untuk semua anggota, mengingat GCC juga terpengaruh dominasi Arab Saudi, sehingga organisasi ini tidak netral dan menjadi lemah. Inefisiensi GCC menyebabkan Qatar terisolasi di organisasi dewan Keamanan ini, hal tersebut bukanlah suatu keuntungan bagi GCC, justru mengakibatkan Hubungan Qatar dan Iran kembali tumbuh. Dampak krisis memberi

kesempatan bagi Iran untuk datang sebagai penolong Qatar, dan mengangsur hubungan keduanya menjadi semakin dekat.

Hal ini menambah kekuatan bagi Qatar sekaligus memberi manfaat bagi Iran. Qatar secara sistematis berhasil menyeimbangkan hubungannya dengan Arab Saudi, AS, dan Iran untuk mengembangkan kebijakan luar negeri regional yang tegas. Qatar juga dapat mewujudkan ambisinya untuk memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Qatar menjadi negara yang terpendang karena mampu menyelamatkan negaranya dengan sumber daya, visi strategis, dan pengaruh ekonominya sendiri. Sehingga Qatar dapat mengembangkan hubungan regional baik dengan negara maupun dengan berbagai kelompok dan aktor di seluruh wilayah, termasuk Taliban, Ikhwanul Muslimin, Hamas dan Iran. Padahal perilaku tersebut sangat dibenci oleh negara-negara tetangganya di Teluk Persia, dan sempat membawa Qatar ke tensi konflik dengan mereka di tahun 2014.

Sedangkan bagi Iran, hal ini juga jauh dapat menguntungkan. Jalan buntu yang terjadi dalam krisis Qatar karena kegagalan peran GCC ini telah menciptakan kerjasama yang lebih besar antara Qatar, Iran dan Turki. Pada November 2017, mereka menandatangani pakta transportasi untuk meningkatkan perdagangan trilateral, dimana hubungan antara Qatar dan Turki dijumpatani oleh Iran. Sehingga Iran dapat meningkatkan hubungan perbankan dan perdagangan dengan Qatar dan dapat mengurangi sanksi AS untuknya terkait bidang tersebut. Tidak bekerjanya GCC akhirnya memberi ruang gerak bagi Iran untuk memainkan banyak peran di regional.

3.2.3 Faktor Trump

Faktor pendorong menguatnya hubungan Qatar dengan Iran ketiga yang didapatkan dari hasil analisa penulis adalah faktor Trump. Faktor ini muncul setelah penulis menemukan dan memaparkan data mengenai eskalasi Amerika Serikat yang terjadi di Arab Saudi sejak Amerika Serikat memasuki era Donald Trump. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, dalam krisis diplomatik Qatar Amerika Serikat khususnya dibawah kepemimpinan Donald Trump memiliki andil yang sangat signifikan. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2016

mengubah situasi Teluk Persia secara dramatis. Trump bersedia mendukung Riyadh dan Abu Dhabi untuk melanjutkan konflik dengan Qatar (Kabalan, 2018). Campur tangan Trump dalam urusan internal GCC (Gulf Cooperation Council) telah meningkatkan intensitas konflik dalam badan dewan keamanan tersebut. Pada awal masa konflik Qatar dengan kuartet anti Qatar, Trump memilih mendukung Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain untuk memberi tekanan, sanksi, bahkan menyematkan julukan “*funder of terrorism at a very high level*” kepada Qatar.

Kita tahu demokrasi, hak asasi manusia, dan terorisme adalah perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tetapi pada era Trump ini, perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya di Timur Tengah lebih condong ke isu-isu terorisme. Seperti pemimpin pendahulu Amerika Serikat lainnya yang memerangi terorisme, Trump juga sangat *concern* dengan isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan terorisme. Dalam studi kasus penelitian ini terlihat, respon dan Sikap Trump dalam konflik GCC muncul ketika Trump mengetahui bahwa Qatar memiliki keterikatan dengan organisasi-organisasi yang telah disepakati oleh negara-negara Teluk sebagai afiliasi terorisme seperti Al-Qaeda, ISIL, Nusa-front di Suriah, Hamas di Palestina, Ikhwanul Muslimin di Mesir serta kedekatannya dengan kekuatan revisionis Iran.

Sehubungan dengan Iran, Trump dilansir membawa kembali kehangatan hubungan Amerika Serikat dan Negara-negara Teluk pada era presiden Bush. Dan mengembalikan kepercayaan negara-negara Teluk yang runtuh akibat gesekan bertahun-tahun selama masa presiden Obama. Interaksi yang ramah antara Presiden Donald Trump dan beberapa pemimpin GCC mulai tumbuh setelah Trump menyatakan bahwa AS tidak akan menempati posisi untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan reformasi politik di luar negeri. Trump juga menyatakan bahwa negara-negara Teluk adalah mitra sejatinya, hal yang tidak pernah dideklarasikan selama pemerintahan Obama. Serta perhatian dan sikap keras Trump terhadap Iran akan menjadi instrumen kedekatan Amerika Serikat dengan para pemimpin Teluk (Feierstein, 2017).

Jika dilihat dari keadaan tersebut, posisi Qatar semakin tertekan karena hadirnya Trump sebagai aktor dominan yang berpihak pada kuartet anti-Qatar.

Tetapi setelah menelaah beberapa sumber dan menganalisa sikap-sikap Emir Qatar, Sheikh Tamim, disini peneliti menemukan bahwa Sheikh Tamim melihat bahwa penguatan aliansi dengan Iran membuka peluang untuk menurunkan pengaruh Amerika Serikat dalam konflik regional tersebut, dan membuatnya berbalik untuk tidak memberikan ancaman yang lebih besar lagi kepada Qatar.

Kebijakan Trump sendiri dipandang sebagai sebuah anomali oleh pejabat-pejabat tinggi Amerika Serikat, salah satunya Sekretaris Negara AS Rex Tillerson. Campur tangan Trump dipandang sebagai tindakan yang konyol bahkan dapat menempatkan Amerika ke posisi yang paling tidak strategis di Timur Tengah. Intervensi Trump melalui cuitan dalam akun pribadi twitternya mengenai isolasi Qatar, kunjungan Trump ke Arab Saudi dalam rangka Riyadh Summit yang membahas tentang isu-isu anti-terorisme dan kesepakatan kerjasama senjata , serta menciptakan retorika anti-Doha yang menghasut kuartet anti Qatar melakukan boikot akhirnya hanya menciptakan kerusakan dan konflik persaudaraan di wilayah Teluk Persia. Menurut Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, Trump turut menciptakan perselisihan Saudi-Qatar yang telah menambah daftar iritasi yang tumbuh di wilayah tersebut.

Terlepas dari semua tekanan, bagaimanapun, Qatar, mengejutkan banyak orang ketika memutuskan untuk melawan kuartet dan menjalin hubungan dengan Iran. Tujuan utama Qatar adalah untuk membekukan konflik dan mencegah tindakan bermusuhan lebih lanjut oleh negara-negara yang memblokadanya. Fokus kebijakan Qatar mengenai hal tersebut adalah adalah Washington. Mengingat Iran merupakan ancaman terbesar bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Mulai dari berbagai dukungan Iran terhadap terorisme serta berhubungan dengan kelompok teroris dan militan adalah bagian integral dari kebijakan luar negeri Iran, bahkan rezim ulama di Teheran mensponsori sejumlah organisasi terorisme internasional di luar kawasan. Pemerintah Iran juga terkenal mendukung rezim Assad di Suriah yang bertujuan untuk menguatkan rezim Syi'ah. Iran juga menjadi ancaman Amerika Serikat karena mengembangkan teknologi nuklirnya sendiri. Mengembangkan senjata nuklir memberanikan Iran dalam upayanya untuk mendominasi dan menggoyahkan Timur Tengah. Bahkan hal tersebut dapat

memicu kematian rezim non-proliferasi global, karena negara-negara Timur Tengah akan bergegas untuk memperoleh kemampuan nuklir mereka sendiri, dan mematikan pengaruh Barat di Timur Tengah.

Hubungan Qatar-Iran akhirnya menciptakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat mengenai isu terorisme, dengan data sejarah yang ada, hubungan Qatar dan Iran dapat mempersatukan Iran dengan afiliasi-afiliasi organisasi terorisme di Timur Tengah. Organisasi keamanan (GCC) yang didirikan pada tahun 1981 untuk melawan ancaman dari Iran sekarang menjadi terpecah dan berbalik menciptakan ketidakamanan terhadap dirinya sendiri ketika pengaruh Teheran di wilayah tersebut tumbuh di tempat-tempat seperti Suriah, Lebanon dan Yaman (Kabalan, 2018). Secara tidak langsung, hal tersebut juga meningkatkan pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Dan jika krisis ini terus berlanjut, pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa selain meningkatkan pengaruh Iran, mengganggu upaya AS melawan Iran dan terorisme, menyebarkan radikalisme dan menciptakan konflik persaudaraan Sunni-Sunni di seluruh wilayah, bahkan dapat mendorong lebih banyak negara dan kelompok di Timur Tengah menuju pelukan Iran (Bakeer, 2017).

Dengan kebuntuan yang ada, Trump adalah satu-satunya orang yang dituntut untuk melebur kekhawatiran tersebut. Setelah berbulan-bulan berusaha keras, Qatar berhasil mengubah posisi Presiden Trump. Sekretaris Negara AS Rex Tillerson sempat mengunjungi Timur Tengah dalam misi diplomasi untuk mencoba memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh bosnya, Trump. Pada awal Juli, berkat upaya Tillerson, AS dan Qatar menandatangani "nota kesepahaman" untuk memerangi terorisme. Beberapa waktu kemudian, Trump tiba-tiba berterima kasih kepada Emir Qatar karena menyepakati kesepahaman tentang "*action to counter terrorism and extremism in all forms*". Tampaknya, Trump telah melakukan panggilan telepon dengan Qatar, dimana Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Trump sebagai presiden : "*reiterated his support for a strong, united Gulf Co-operation Council (GCC) that is focused on countering regional threats*". (Harwood, 2018)

The White House statement diakhiri dengan pernyataan: *"The leaders discussed areas in which the United States and Qatar can partner to bring more stability to the region, counter malign Iranian influence, and defeat terrorism."* (Harwood, 2018). Dalam hal ini, Qatar berhasil mengalihkan rute penerbangan ke dan dari Doha melalui wilayah udara Iran, mendapatkan jaminan keamanan dari Iran setelah Qatar mengirim kembali duta besarnya ke Teheran. Dan disisi lain, Qatar dapat merubah posisi Trump karena Qatar adalah satu-satunya negara Teluk yang memiliki pengaruh dengan rezim Teheran. Dalam langkahnya untuk menguatkan hubungan dengan Iran sebagai salah satu bentuk negaranya untuk bertahan, Qatar adalah pihak yang menuai manfaat dari kedua belah pihak.

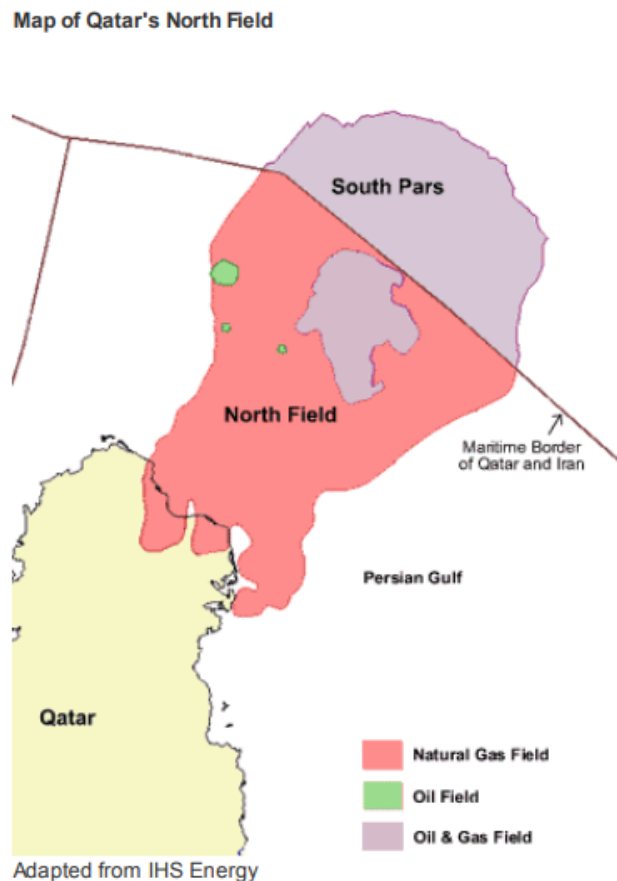
Meninggalkan Qatar dalam krisis akan merusak tatanan baik di regional dan memperbesar kemungkinan untuk hilangnya pilar penting di Timur Tengah. Dan Amerika Serikat sadar bahwa Qatar, dengan bantuan Iran mampu menciptakan monopoli gas dengan konsekuensi bagi pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, krisis diplomatik atar ini telah menempatkan Amerika Serikat dalam dilema serius, karena tindakan keras yang menguntungkan kedua pihak harus ditimbang terhadap dampak terhadap 10.000 personel Amerika di Pangkalan Udara Al Udeid Qatar, pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah. Setiap ancaman terhadap keamanan GCC adalah ancaman bagi kepentingan nasional AS.

Lebih penting lagi, akhirnya Qatar memenangkan komitmen AS yang solid terhadap keamanannya. Setelah dialog strategis tahunan pertama AS-Qatar di Washington pada 30 Januari 2018, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Qatar dalam usaha mencegah dan menghadapi ancaman eksternal terhadap integritas teritorial Qatar yang tidak konsisten dengan Piagam PBB (Kabalan, 2018). Departemen Pertahanan AS (DOD) dan Kementerian Pertahanan Negara Qatar menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang dukungan Qatar terhadap kegiatan DOD di Pangkalan Udara Al Udeid (AUAB) selama Dialog Strategis AS-Qatar kedua di Doha , Qatar 13 Januari 2018. MOU akan membantu mempromosikan interoperabilitas, mendukung stabilitas regional, dan menegaskan kembali hubungan pertahanan AS-Qatar (U.S. Department of Defense, 2019).

3.2.4 Faktor Emir Hamad, Ladang Gas, dan Iran

Dalam langkah untuk menghadapi krisis diplomatik Qatar tahun 2017 faktor selanjutnya yang mendorong Qatar untuk lebih memilih memperkuat hubungannya dengan Iran daripada kembali ke koalisi Teluk dan menuruti 13 tuntutan kuartet anti-Qatar adalah ladang gas. Qatar dan Iran berbagi ladang gas terbesar di dunia, North Dome Field bagi Qatar dan South Pars bagi Iran. North Field dan South Pars merupakan ladang gas terbesar di dunia yang terletak di garis perbatasan perairan bersama antara Iran dan Qatar di Teluk Persia. Ladang gas terbesar ini berukuran 9.700 km persegi dengan 6000 km persegi merupakan bagian Qatar sedangkan bagian Iran seluas 3.700 km persegi (Qatar Petroleum, 2018) (Petropars, 2019). Sepanjang sejarahnya, ladang gas ini tidak hanya berguna bagi kekuatan ekonomi kedua negara tetapi juga untuk kekuatan politik, terutama bagi Qatar.

Gambar 3. 7 Peta Perbatasan Wilayah North Dome Qatar dan South Pars Iran



Sumber : (U.S. Energy Information Administration, 2013)

Ladang gas ini sangat berjasa untuk menaikkan derajat dan perannya di Timur Tengah. Qatar menjadi negara yang memiliki cadangan gas ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran. Sektor gas ini juga yang menjadikan Qatar sebagai pengeksport gas alam cair terbesar di seluruh dunia. Kepemilikan ladang gas ini membentuk kemandirian finansial Qatar dan menjadikannya negara kecil nan kaya raya. Melalui ladang gas ini juga Qatar tumbuh menjadi negara dengan GDP perkapita tertinggi (tahun 2012 mengalahkan Luxemburg). Wealth menjadi kunci utama dari kekuatan ekonomi dan politik Qatar yang akhirnya memampukan negara kecil ini membentuk kebijakan politik luar negeri “*open and independent*” yang bertumpu pada “*soft and smart power*” melalui aktivitas-aktivitas media (khususnya Al-Jazeera), peran diplomasi, mutu pendidikan, serta sosial budaya (Ir. Indria Ernaningsih, n.d.). Kebijakan ini dijalankan atas dasar strategi bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga, pembentukan aliansi strategis serta pembangunan “*nation’s brand*”. Tentu saja, dengan kekayaan finansial muncul kebutuhan Qatar untuk menyebarkan pengaruh politiknya. Kekayaan Qatar ini kemudian mempresentasikan peran Qatar di panggung regional bahkan internasional. Oleh karena itu, ladang gas merupakan sektor yang sangat vital bagi keamanan dan kesejahteraan Qatar. Sektor gas telah mendorong Qatar untuk membentuk kebijakan yang melibatkan Iran demi mengamankan sumber kekayaannya tersebut dan penting bagi negara-negara dunia untuk memastikan stabilitas atas ladang gas vital ini. Dengan demikian dapat mendorong Iran dan Qatar untuk menjaga hubungan yang hangat dan manajemen ganda yang bertanggung jawab atas ladang gas tersebut (Seznec, 2016).

Faktor ini dapat ditemukan ketika meninjau visi Sheikh Hamad dan hubungan saling tergantung antara Qatar dan Iran mengenai pengembangan proyek LNG tersebut. Merupakan hal yang mutlak bagi Qatar untuk mempertahankan ladang gas yang menjadi sumber daya yang berlimpah sekaligus sebagai sumber kekuatan politiknya itu. Analisis pertama, ladang gas meningkatkan kekuatan ekonomi Qatar. North Dome Field dan South Pars tersebut telah berhasil membawa Qatar menjadi negara yang memiliki cadangan gas, minyak, dan kondensat terbesar di dunia yaitu senilai 62,8 ribu BOE (Barrel of Oil Equivalent) perkapita, sekaligus telah menjadikan Qatar sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita

mencapai USD124,5 ribu dalam hal *purchasing power parity* (PPP) pada 2017. Begitupula dengan Iran, Ladang gas ini dianggap sebagai sumber energi paling signifikan.

Ada atau tidaknya krisis diplomatik yang dialami Qatar sejak Juni 2017 silam tidak merubah status Qatar sebagai negara kecil di Teluk tetapi sangat kaya. Berdasarkan laporan *Sovereign Wealth Fund*, aset kekayaan berdaulat Qatar atau *Qatar Investment Authority* (QIA) diperkirakan mencapai \$320 miliar. Dari aset kekayaan yang dimiliki, Qatar tampak mampu menghadapi dampak ekonomi akibat krisis diplomatik yang diikuti dengan pemblokiran akses wilayah darat, udara, dan laut oleh kuartet anti Qatar 2017 silam. Bahkan menurut laporan *Qatar National Bank* (QNB) tahun 2018, meskipun beberapa tetangganya memberlakukan blokade, kinerja ekonomi Qatar tetap tangguh. Dilaporkan ekonomi Qatar mengalami pertumbuhan 1,6% pada tahun 2017. Dengan ukuran populasi yang kecil, Qatar diberkahi dengan cadangan hidrokarbon utama (berupa gas alam, minyak, dan kondensat) yang berlimpah. Dimana terletak di wilayah lepas pantai Qatar bagian utara atau yang disebut North Dome Field yang juga merupakan ladang cadangan gas alam tunggal terbesar di dunia. (Economics Team of Qatar National Bank, 2018)

Analisis kedua, visi Sheikh Hamad. Salah satu tokoh yang sangat optimis dengan LNG Qatar adalah Sheikh Hamad. Sejak kudeta yang terjadi di Qatar pada tahun 1995, dimana Emir Sheikh Khalifa digulingkan oleh putranya sendiri Sheikh Hamad, Qatar mulai memiliki arah kebijakan yang mandiri. Berbanding terbalik dengan Ayahnya, Khalifa bin Hamad Al-Thani, yang jauh kurang agresif dalam mempromosikan pengembangan sumber daya negara, Emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, memiliki semangat visioner yang optimis bahwa sumber daya gas alam yang ditemukan di lepas pantai Qatar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat keamanan dan pengembangan ekonominya. Sheikh Hamad menjadi pemimpin pertama Qatar yang ingin melepaskan negara tersebut dari kontrol Arab Saudi, dan berupaya keras untuk menemukan dan mengembangkan North Dome Field ini.

Sejak Qatar dengan bantuan perusahaan Shell oil menemukan North Dome Field di tahun 1971, peminat gas alam cair atau LNG masih sangat minim sehingga Qatar sebelumnya memandang gas alam merupakan sumber daya alam yang tidak berharga. Negara-negara Teluk masih mengutamakan minyak sebagai kekayaan alam yang lebih menguntungkan. Sampai akhirnya tahun 1979, harga minyak bumi mengalami penurunan drastis sehingga mengakibatkan defisit ekonomi besar-besaran akibat jatuhnya harga produksi minyak di tahun 1982 dan 1983 sebagai akibat dari embargo minyak pasca revolusi Iran tahun 1979 (Hashimoto, et al., 2004). Qatar juga menjadi salah satu negara yang menerima dampak tersebut, dan berusaha bangkit melalui cadangan gas alam yang ia miliki tetapi tidak masif. Dan Sheikh Kalifa, ayah dari Sheikh Hamad tidak menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan North Dome tersebut. Sampai akhirnya, Sheikh Hamad berhasil mengukudeta, pandangan Qatar terhadap LNG berubah drastis. Sheikh Hamad memanfaatkan LNG untuk memajukan negara Qatar, dan optimis bahwa bidang ini adalah sumber kekuatan ekonomi maupun politik Qatar. Sheikh Hamad memiliki tekad untuk mencari pengganti proyek-proyek minyak yang tidak banyak menguntungkan Qatar dan yang menjadi perangkap bagi Qatar untuk selalu berada di bawah kontrol Saudi.

Dalam usaha mengembangkan proyek LNG ini, Sheikh Hamad mengalami berbagai macam hambatan. Jepang sempat menjadi konsumen tetap gas alam dari Qatar, tetapi mulai menurunkan permintaannya sejak terjadinya perang Iran-Iraq. Perang yang berlangsung sangat lama tersebut telah membuat Jepang khawatir untuk memasok kebutuhannya dari Qatar karena harus melewati kawasan berkonflik atau zona perang. Akibatnya, mitra asing Qatar tersebut enggan membantu membiayai proyek LNG yang dikembangkan Qatar. Sehingga pengembangan North Dome untuk ekspor LNG melalui pipa terhambat sepanjang tahun 1980-an. Kemudian Sheikh Hamad tertarik untuk merubah North Dome sebagai sumber energi regional. Qatar mulai mempromosikan pipa LNG nya ke negara-negara GCC. Tahun 1996 Qatar mengeksport hasil gas nya melalui pipa regional ke beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), khususnya Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan UEA. Pada awalnya, Qatar berpikir membangun pipa ke negara-negara GCC menjadi usaha yang lebih pragmatis untuk

meningkatkan keuangan Qatar. Namun tahun 1989, proyek pipa LNG tersebut macet karena perselisihan politik. Arab Saudi juga menolak pipa gas Qatar dengan alasan telah mengembangkan sumber gas nya sendiri dan takut bahwa pipa Qatar akan berdampak buruk bagi kepentingan Saudi. Bahrain juga menolak karena memiliki sengketa perbatasan dengan Qatar. Kuwait juga tidak mendukung akibat tuntutan Arab Saudi. Tidak ada satupun dari negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC bersedia mendukung proyek LNG Qatar, negara-negara tersebut menunjukkan sikap bahwa Qatar tidak berhak untuk mengungguli kekuatan negara-negara tersebut terutama Arab Saudi dalam semua bidang. (Dargin, 2007) Penolakan negara-negara tetangganya tersebut membuat Sheikh Hamad mencari langkah lain untuk tetap mempertahankan ladang gas nya tersebut. Melihat negara-negara tetangganya tidak mendukung, Sheikh Hamad semakin menunjukkan kebijakan luar negeri yang independen. Oleh sebab itu pula, hubungan Qatar dan Iran terbentuk dan semakin kontroversial.

Analisis ketiga, hubungan saling tergantung antara Qatar-Iran mengenai ladang gas. Ketika pertama kali menemukan Lapangan Utara, Shell (perusahaan swasta yang pertamakali memfasilitasi Qatar menemukan North Dome Field) menandakan bahwa ladang itu mungkin tumpang tindih dengan wilayah laut Iran. Pemerintah Qatar memerintahkan agar peta resmi itu mengecualikan bagian yang tumpang tindih dengan wilayah Iran. Sampai kemudian Iran menemukan ladang gas serupa di wilayah perairannya yang dinamai South Pars. Hal ini sempat menambah ketegangan di Teluk Persia, karena Qatar yang masih menggebu soal LNG menghasikan kebijakan yang eksploitatif (Dargin, 2008). Sampai akhirnya, tahun 1980an Qatar dan Iran mencapai kesepakatan untuk mendefinisikan bidang North / South Pars. Tahun 1994, Qatar dan Iran menyetujui investasi bersama sebesar \$ 3 miliar untuk memulai pengembangan ladang gas Pars Selatan. Pada awal 2002, Qatar dan Iran melakukan studi kelayakan bersama untuk bekerjasama mengolah dan memanfaatkan hasil dari ladang gas tersebut (Dargin, 2008). Tahun 2009, Menteri Perminyakan Gholam-Hosseini Nozari menyatakan bahwa pemerintah Iran telah memberikan lampu hijau untuk penerbitan obligasi senilai 1 miliar euro untuk membantu membiayai pengembangan ladang gas Pars Selatan, sebuah langkah progresif yang ditunjukkan oleh Iran untuk memajukan ladang gas

terbesar di dunia yang dibagi bersama Qatar tersebut (Tehran Times, 2009). Menteri Energi Qatar saat itu, Al-Attiyah meyakinkan bahwa, lebih dari 40 persen dari cadangan gas alam dunia ada di North Dome dan South Pars. Qatar dan Iran akan muncul sebagai pemain utama dalam industri gas alam internasional.

Dari ketiga analisis tersebut dapat terlihat bahwa mempertahankan ladang LNG adalah hal yang lebih penting bagi Qatar. Jika Qatar lebih memilih untuk kembali ke koalisi Teluk dan menuruti tuntutan-tuntutannya maka hal tersebut dapat menjadi akhir dari kejayaan ladang gas Qatar, karena ia harus berhadapan lagi dengan masalah perbatasan ladang gas dengan Iran. Qatar akan menghadapi sengketa besar-besaran dengan Iran baik tentang hak eksplorasi ladang gas beserta hasilnya, mengingat ladang gas ini mengandung unsur-unsur strategis dan sensitif dalam hubungan antarnegara. Oleh karena itu, Iran adalah koalisi yang lebih tepat untuk dipilih dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar ini. Iran juga dapat dikatakan berjasa karena mendukung pengembangan proyek ladang gas bersama tersebut. Investasi bersama Iran-Qatar sebesar \$3 miliar untuk memulai pengembangan ladang gas Pars Selatan pada tahun 1994 dan masalah politik yang menghambat pengembangan jaringan pipa regional telah memberi dorongan lebih besar bagi Qatar untuk semakin optimis mengeksport gas sebagai LNG. Berkat portofolio LNG tersebut, Qatar dapat beralih dari ketergantungan yang besar pada minyak, komoditas sumber daya yang didominasi oleh Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi memiliki sedikit pengaruh di dunia LNG. Sehingga Qatar dapat mewujudkan langkahnya untuk mejadi eksportir gas utama dan untuk mencapai hubungan ekonomi dan keamanan yang berada di luar pengaruh langsung Arab Saudi.

Visi Sheikh Hamad untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang independen juga mendukung faktor ini. Jika Sheikh Hamad sama seperti Sheikh Kalifa maka Qatar akan selamanya berada di bawah bayang-bayang Arab Saudi beserta koalisinya, dan Qatar tidak akan pernah menikmati keberkahan ladang gas tersebut secara mandiri. Menurut Justin Gardin, seorang peneliti isu-isu Middle Eastern Gas di *Oxford Institute for Energy Studies*, dalam tulisannya yang berjudul *The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative (2008)* dan *Qatar's*

Natural Gas: The Foreign-policy Driver (2007) memaparkan bahwa ladang gas yang dimiliki Qatar tersebut merupakan batu kunci bagi upaya Qatar untuk membangun kebijakan luar negeri yang independen di luar dominasi Arab Saudi, dan untuk menciptakan peningkatan ikatan ekonomi dan politik dengan AS, Eropa, dan Asia. Bahkan sumber daya tersebut juga mampu meningkatkan kepentingan global Qatar. Sebagaimana keyakinan Emir Hamad yang berpandangan jauh ke depan, Qatar telah membuat banyak kemajuan dalam mengangkat dirinya sendiri dari negara kecil yang belum berkembang menjadi satu dari negara-negara Teluk yang paling progresif dan maju. Walaupun saat ini Sheikh Hamad telah menyerahkan tahtanya kepada Sheikh Tamim, putranya yang baru berusia 34 tahun, visi tersebut tidak hilang, dikarenakan samapai saat ini, kepemimpinan Sheikh Tamim masih berada dibawah panduan dan bayang-bayang ayahnya, Sheikh Hamad.

3.3 Hasil Penguatan Aliansi Qatar-Iran Dalam Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017

Salah satu hasil yang paling merusak dari krisis Qatar adalah telah terciptanya ketidakpercayaan antara Doha dan Riyadh. AS memainkan peran penting dalam mencegah eskalasi serius dalam krisis, yang mungkin termasuk aksi militer terhadap Qatar. Namun, Qatar terus khawatir bahwa Arab Saudi memiliki ambisi untuk perubahan rezim di Doha, dan telah terjadi ketegangan antara pasukan udara Saudi dan Qatar. Karena itu, tidak mudah bagi Qatar untuk meninggalkan Iran, negara yang membuka pintunya ke Doha pada saat yang sulit dan untuk sepenuhnya percaya bahwa Arab Saudi akan melupakan langkah-langkah ekonomi atau militer lebih lanjut terhadapnya di masa depan. Melalui konsep Bandwagoning, hasil tersebut akan dijelaskan.

Bandwagon dengan Iran merupakan cara yang strategis untuk memutar keadaan Qatar, sehingga mengantarkan negaranya ke tahap Survive. Hal tersebut juga mampu meningkatkan kapabilitas Qatar di regional. Qatar berhasil meningkatkan *power* nya untuk menghadapi tuntutan Quartet, menurunkan tensi ancaman dari kuartet hasilnya Qatar berhasil mencapai keamanan dan bertahan dalam sistem internasional yang anarki sebagai negara yang independen. Bahkan

peran Qatar dan Iran semakin menonjol di Kawasan, tentu hal ini merupakan capaian yang sangat strategis.

Jika Qatar berdiri sendiri dalam krisis diplomatik yang disertai dengan pemblokiran akses darat, udara pada tahun 2017 silam maka tidak ada pilihan lain bagi Qatar selain tunduk terhadap kuartet anti Qatar, tunduk terhadap tuntutan-tuntutannya, serta kembali hidup dalam bayang-bayang Arab Saudi. Ketidakseimbangan kekuasaan mengakibatkan posisi Qatar menjadi sangat sulit. Oleh karena itu Qatar melakukan penyeimbangan kekuatan untuk menghindari ketimpangan. Strategi *bandwagoning* telah menghantarkan Qatar untuk bersekutu dengan negara yang sampai sekarang dianggap agresif oleh penentangannya, yaitu Iran. Dalam krisis diplomatik Qatar, secara geostrategis dan geopolitik Qatar memang terhimpit oleh dua kekuatan besar yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Kekuatan tersebut adalah Iran dan Arab Saudi. Qatar tidak dapat menyeimbangkan kekuatan dengan mereka seorang diri karena penuh resiko dan “biaya”, oleh karena itu Qatar memilih salah satu yang dianggapnya paling kuat, berpengaruh, dan memberikan manfaat lebih banyak untuk pertahanan Qatar.

Strategi ini lebih dipilih daripada jatuh ke tangan negara-negara besar yang menyebabkan ketegangan krisis diplomatik Qatar di Teluk Persia. Alasan mengapa Qatar mengadopsi strategi ini menggarisbawahi ketakutan alami yang dimiliki negara kecil yang terhimpit konflik dengan negara-negara kuat lainnya. Perjanjian Qatar dengan Iran menunjukkan bahwa keamanan Qatar hanya dijamin selama keamanan Iran diamankan. Dengan kata lain, keyakinan bahwa keamanan Qatar tergantung pada keamanan dan kesejahteraan Iran, setelah itu *bandwagon* akan memberi Qatar rasa perlindungan. Hal ini adalah situasi di mana keterlibatan Qatar dengan Iran menciptakan gagasan bahwa negara-negara, khususnya negara-negara yang lebih lemah akan mencari negara kuat lainnya untuk bergabung dan menambah povernya dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Qatar tidak dapat menyeimbangkan ancaman dengan kekuatannya sendiri yang lebih lemah dibandingkan agresor-agresornya, dan strategi yang dipilihnya selalu dimaksudkan untuk mencerminkan identitasnya sebagai negara kecil, lemah dan rentan di masa-masa krisis.

Cara Qatar menangani ancaman eksternal mencerminkan kemampuannya untuk bereaksi secara strategis terhadap kondisi eksternal. Perannya dapat tercermin melalui penjelasan Walt (1987) bahwa negara-negara kecil lebih mungkin untuk melakukan *bandwagoning* dengan kekuatan besar yang agresif daripada berusaha menyeimbangi power negara besar terhadapnya. Studi ini juga menjawab bahwa ketika kemampuan tidak terdistribusi secara merata di antara negara-negara dalam suatu struktur regional maupun internasional, negara-negara yang memiliki kekuatan terbatas memilih untuk memaksimalkan keamanan mereka dengan cara yang berlawanan dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan potensi manuver. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal yang berlaku pada pertengahan 2017 menjadi hambatan bagi keamanan individual Qatar, sehingga pemerintahnya berusaha melepaskan diri dari kontrol negara-negara dominan di koalisi Arab Saudi.

Jadi, apa yang membuat Qatar memilih Iran untuk *bandwagoning* Menurut Waltz (1979) adalah yang pertama, krisis diplomatik telah menarik Qatar ke kondisi terlemah baik dalam hal ekonomi maupun politik, Qatar yang terisolasi tidak memiliki cukup power dalam menghadapi intimidasi kuartet. Lemahnya sistem militer Qatar, perekonomian yang kacau akibat embargo, dan tuntutan-tuntutan kuartet yang menekan kemerdekaan Qatar memaksanya untuk mencari bantuan dari negara lain. Qatar tidak dapat membangun hubungan luar negeri yang kuat dengan negara-negara tetangga terdekatnya atau membangun kesepakatan yang adil untuk keluar dari masa krisis.

Kepercayaan yang dimiliki Qatar di Iran mendorongnya untuk lebih mendekat dan mendapatkan bantuan, Qatar mengharapkan Iran menyediakan keamanan. Menurut Waltz (1979, hal. 115), perilaku tersebut dibenarkan dengan beberapa alasan antara lain : karena Qatar menjadi korban pertama ekspansi atau intimidasi, karena Qatar tidak memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri, dan karena aliansi Qatar di GCC beroperasi terlalu lambat untuk memberi bantuan atau penyelesaian yang tepat sehingga mengakomodasi kekuatan kuartet anti Qatar untuk semakin mengancam. Berdasarkan argumen Walt (1987), negara akan tergoda untuk ikut-ikutan ketika sekutu tidak tersedia. Pada saat krisis diplomatik

2017, Qatar tidak menemukan negara lain dalam sistem internasional yang dapat dipercaya untuk masalah-masalah pertahanan atau urusan luar. Iran adalah negara pertama dan satu-satunya yang siap memberikan bantuan bagi Doha sesaat setelah blokade dan pemutusan hubungan diplomatik dari kuartet terjadi.

Sebagai negara yang sedang jatuh, daripada mencari dukungan dari mitra negara yang belum teruji, Qatar secara konsisten menekankan menciptakan hubungan strategis yang penting dengan Iran untuk tetap bisa bertahan hidup atau *survive*. Bandwagon terjadi dalam pertukaran untuk saling menguntungkan antara negara yang lebih lemah dan yang lebih kuat. Pertukaran untuk fasilitas antara yang lemah dan kuat biasanya diwakili oleh pertukaran manfaat bersama seperti keuntungan teritorial, keamanan dan perlindungan atau perjanjian. Bukti empiris dari rasa saling percaya atas pemberian keamanan dari Iran ke Qatar dengan imbalan Qatar patuh terhadap perjanjian pembagian ladang gas bersama (South Pars/North Dome) sehingga secara eksplisit Qatar membantu Iran memperkaya diri melalui pengelolaan ladang gas alam bersama tersebut. Selanjutnya, Iran adalah salah satu negara yang paling diperangi di Teluk Persia dan oleh kaum Barat terutama AS, Qatar berkomitmen untuk tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan agresi militer apapun terhadap Iran, mengingat Qatar masih terikat dengan Amerika Serikat perihal pangkalan udara Al-Udeid, Qatar akan tetap berkomitmen menjaga hubungan yang damai dan mengusahakan penyelesaian masalah yang menyangkut soal Iran dengan cara damai. Karena dalam bandwagon keuntungan adalah untuk kedua belah pihak, namun, dalam jangka pendek dan jangka panjang negara kecil mendapatkan lebih banyak keuntungan. Qatar melakukannya karena yakin bahwa bantuan Iran akan tersedia. Seperti Schweller (1994, hlm. 92-93) menyatakan dalam bahasa teori sistem, *bandwagoning* adalah bentuk umpan balik positif.